

Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Tanah Bumbu

RENCANA STRATEGIS 2025-2029



KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR HK.02.02.16C.12.25.88 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2025-2029**

KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada

- Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu] dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
- b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Bumbu
pada tanggal : 05 Desember 2025
Kepala Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu



DIFA ANANDA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025-2029 dapat disusun dengan baik dan lancar.

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia menyusun Renstra dengan memperhatikan berbagai kondisi, baik secara internal maupun eksternal serta untuk memenuhi tuntutan profesionalisme pelayanan pemerintah yang cepat, tepat, efektif dan efisien sebagai prasyarat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance and clean government*).

Renstra Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan indikatif yang mengacu pada Renstra Badan POM 2025 - 2029. Renstra ini memuat berbagai program dan kegiatan serta menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan selama kurun waktu 2025-2029. Dokumen ini diharapkan dapat meraih peluang dan menjawab tantangan yang ada di lingkungan strategis Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 sehingga fungsi pengawasan bisa ditingkatkan dan mempunyai daya ungkit dalam meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.



Dengan tersusunnya dokumen Renstra 2025 – 2029 ini, semoga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

Tanah Bumbu, 07 November 2025
Kepala Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu



Difa Ananda, S.Farm



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian (LPNK) yang mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional Republik Indonesia. BPOM berperan penting dalam memastikan sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di Indonesia aman berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat melalui evaluasi keamanan, mutu dan efikasi yang ketat. Hal tersebut untuk melindungi kesehatan masyarakat serta mendukung kepercayaan masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di Indonesia.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Untuk mencapai kinerja dengan maksimal, BPOM dilaksanakan dengan struktur organisasi yang terdiri eselon I dan II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi di Indonesia, salah satu UPT BPOM yaitu Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

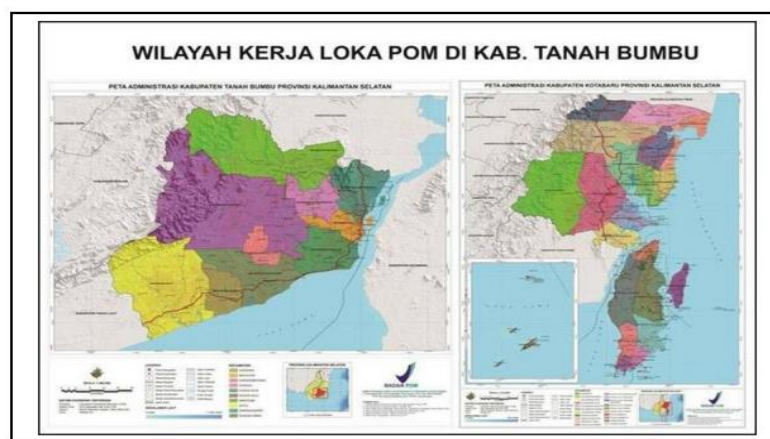
Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat



dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39) Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di dua kabupaten yang menjadi wilayah cakupan pengawasan, yaitu meliputi :

- a) **Kabupaten Tanah Bumbu:** Kabupaten Tanah Bumbu secara geografis terletak antara 2°52' - 3°47' Lintang Selatan dan 115°15' - 116°04' Bujur Timur. Secara geografis terletak di ujung tenggara Pulau Kalimantan, berbatasan dengan: Kabupaten Kotabaru di sebelah utara dan timur, Laut Jawa di sebelah selatan, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut di sebelah barat. Luas wilayahnya 4.890,30 km² (BPS Kabupaten Tanah Bumbu, 2021/<https://tanahbumbukab.go.id/>).
- b) **Kabupaten Kotabaru;** Kabupaten Kotabaru secara astronomis terletak antara 2°20' sampai dengan 4°21' Lintang Selatan dan 115°15' sampai dengan 116°30' Bujur Timur. Secara geografis, berada di ujung tenggara Provinsi Kalimantan Selatan, berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kotabaru memiliki batas-batas: Utara - Provinsi Kalimantan Timur, Selatan – Laut Jawa, Timur – Selat Makasar, Barat – Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Banjar, dan Tanah Bumbu. Luas wilayahnya 9.442,46 km² (BPS Kabupaten Kotabaru, 2021/<http://mc.kotabarukab.go.id/peta-wilayah/>).

Gambar1. Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu



Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi sediaan farmasi dan pangan olahan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan serta fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi serta distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan;
- e. Pelaksanaan sampling sediaan farmasi dan pangan olahan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan;
- g. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan;
- h. Pelaksanaan pemantauan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan secara daring;
- i. Pengelolaan komunikasi, informasi dan edukasi, serta pengaduan masyarakat di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan; dan
- l. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng dibantu secara langsung oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu terdapat beberapa kelompok jabatan fungsional antara lain:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), menjelaskan tugas Jabatan Fungsional PFM yaitu melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang meliputi standarisasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, penilaian, pemantauan dan penyuluhan terkait sediaan farmasi dan pangan olahan. Di Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Kelompok Jabatan Fungsional PFM terdiri atas jenjang:

- a) Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama, dengan jumlah 10 (sepuluh) petugas
- b) Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, dengan jumlah 3 (tiga) petugas

2. Kelompok Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN

Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/ Lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundangundangan. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki 2 (dua) petugas dengan Jabatan Fungsional sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama.



3. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN

Fungsi utama Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN, yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai, dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki 1 (satu) petugas dengan Jabatan Pranata APBN Terampil.

4. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata SDM, memiliki tugas melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki 1 (satu) petugas dengan Jabatan Pranata SDM Aparatur Terampil.

5. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Jabatan Fungsional Pranata Komputer diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki 1 (satu) petugas dengan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Terampil.

6. Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, tugas pokok arsiparis adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan



kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki 1 (satu) petugas dengan Jabatan Arsiparis Terampil.

7. Kelompok Jabatan Fungsional Umum

Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tiga jabatan fungsional umum, yaitu:

- Penata Kelola Obat dan Makanan, dengan jumlah 1 (satu) petugas
- Penata Layanan Operasional, dengan jumlah 1 (satu) petugas
- Pengelola Layanan Operasional, dengan jumlah 1 (satu) petugas.

Gambar2. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu



Selain, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh Kementerian/Lembaga termasuk BPOM diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Kontribusi BPOM terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung



pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

BPOM beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BPOM untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar. Hal tersebut menjadikan pentingnya pengembangan Rencana Strategis (Renstra) BPOM untuk periode 2025-2029.

Sebagai bentuk komitmen Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dalam mendukung Renstra BPOM 2025-2029, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan penyusunan Renstra 2025-2029 yang mengacu dan sejalan dengan Renstra BPOM yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kewilayahan pengawasan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Renstra BPOM dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan serta untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan BPOM untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Renstra Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu menjadi komitmen dalam melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat diwilayah kerja UPT memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

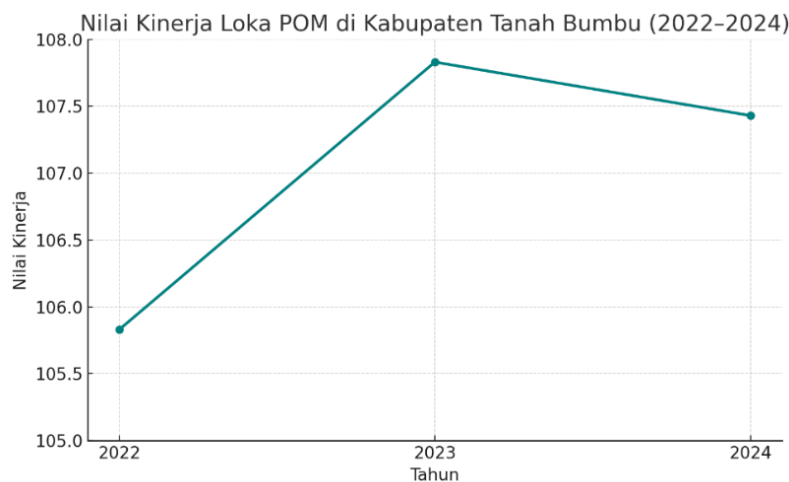


1.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu 2020-2024

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2020-2021 masih menjadi UPT dibawah koordinasi langsung oleh Balai Besar POM di Banjarmasin, sehingga untuk nilai capaian kinerja pada tahun 2020-2021 masih menjadi nilai capaian Balai Koordinator.

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu telah menjadi satuan kerja mandiri, sehingga telah dilakukan reviu Renstra 2022-2024 yang menjadi dasar pengukuran capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu periode 2022-2024. Berikut grafik nilai kinerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun 2022 sampai dengan 2024:

Gambar3. Nilai Kinerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu (2022-2024)



Capaian kinerja rencana strategis Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama
Loka POM di Tanah Bumbu Tahun 2022-2024

IKU	2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Sasaran Kegiatan 1 : Terwujudnya obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja UPT									
Persentase Obat yang memenuhi syarat	87.50	98.51	112.58	90.50	97.69	107.95	98.00	98.53	100.54
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82.00	96.15	117.26	84.00	89.29	106.29	92.70	93.10	100.43
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77.00	90.00	116.88	79.00	95.74	121.20	95.80	100.00	104.38
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.00	100.00	104.17	97.00	92.31	95.16	96.10	100.00	104.06
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	94.00	100.00	106.38	94.00	100.00	106.38
Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan									
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	94.50	97.26	102.92
Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu									
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan	85.00	95.10	111.88	86.00	100.00	116.28	100.00	100.00	100.00



IKU	2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
distribusi yang dilaksanakan									
Persentase Keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62.00	74.31	119.86	65.0	78.77	121.19	78.80	86.97	110.37
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100.00	100.00	100	100.00	100.0	100	100.00	100.00
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55.00	63.89	116.16	60.00	72.22	120.37	72.30	78.85	109.06
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63.00	73.08	116.00	66.00	72.37	109.65	72.70	76.44	105.14
Persentase UMKM yang memenuhi standard produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan kosmetik	77.00	100.00	129.87	79.00	100.00	126.58	100	100.00	100.00
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program	-	-	-	-	-	-	95.00	100.00	105.26



IKU	2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota									
Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu									
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.80	94.53	104.11	92.60	94.71	102.28	95.59	95.98	100.41
Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu									
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.0	50.00	50.00	100.00
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	50.00	100.0	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00
Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu									
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98.00	100.00	102.04	99.00	100.00	101.01	100.00	100.00	100.00
Sasaran Kegiatan 7 : Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal									
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



IKU	2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Kabupaten Tanah Bumbu									
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-
Nilai AKIP	-	-	-	82.20	75.52	91.87	74.29	76.24	102.62
Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	90.42	97.49	107.82
Sasaran Kegiatan 8 : Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang berkinerja optimal									
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	83.50	86.15	103.17	84.00	91.00	108.33	91.15	86.67	95.09
Sasaran Kegiatan 9 : Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu									
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang optimal	2.25	3.00	133.33	2.50	3.00	120.00	3.00	3.00	100.00
Sasaran Kegiatan 10 : Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu secara Akuntabel									
Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	90.60	91.74	101.26	91.80	91.88	100.09	88.91	95.93	107.90
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	89.00	97.82	159.13



IKU	2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	89.00	94.80	106.52

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki 10 Sasaran Kegiatan (SS) dan 27 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSS). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

- Persentase Obat yang memenuhi syarat; Pada tahun 2022 indikator persentase capaian Obat yang memenuhi syarat mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 16.82% menjadi 112.58% dengan kategori Memenuhi Ekspektasi. Pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 4.63% menjadi 107.94% dengan kategori capaian Sangat Baik. Pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 7.41% namun masih memenuhi target dengan kategori Sangat Baik. Penurunan persentase juga dipengaruhi karena terdapat peningkatan target kinerja dari tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 7.5%.
- Persentase makanan yang memenuhi syarat; Pada tahun 2022 indikator persentase capaian makanan yang memenuhi syarat mengalami peningkatan sebesar 0.88% menjadi 117.26% dengan dengan kategori Memenuhi Ekspektasi. Pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 10.97% menjadi 106.29% dengan kategori capaian Sangat Baik. Pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 5.85% namun masih memenuhi target dengan kategori Sangat Baik. Penurunan persentase juga dipengaruhi karena terdapat peningkatan target kinerja dari tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 8.70%.



- c) Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; Pada tahun 2022 persentase mengalami penurunan sebesar 83.36% menjadi 116.88% dengan kategori Memenuhi Ekspektasi. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali sebesar 4.31% menjadi 121.19% dengan Tidak dapat disimpulkan (karena lebih dari 120.00%). Pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 16.81% namun masih memenuhi target dengan kategori Sangat Baik. Penurunan persentase disebabkan karena terdapat peningkatan target kinerja dari tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 16.8%.
- d) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Pada tahun 2022 indikator persentase capaian Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan mengalami peningkatan sebesar 7.68% menjadi 104.17% kategori capaian Memenuhi Ekspektasi. Pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 9.01% menjadi 95.16% dengan kategori capaian Sangat Baik. Pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 8.9% dengan kategori Sangat Baik. Peningkatan persentase juga dipengaruhi karena terdapat penurunan target kinerja dari tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 0.80%.
- e) Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat; Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada tahun 2023 dan 2024 adalah 100.00.

2. Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT. Indikator ini merupakan Indikator yang baru menjadi IKU di tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.



Dalam pencapaian kinerja pada indikator ini juga dipengaruhi oleh realisasi output kegiatan yang sesuai dengan RAPK Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2024. Dimana pelaksanaan indikator ini sampai dengan triwulan IV didukung oleh subkomponen kegiatan yang telah terealisasi. Kegiatan – kegiatan tersebut berupa layanan ULPK pada tahun 2024 dan pembinaan UMKM Pangan Olahan untuk memperoleh sertifikat CPPOB pada tahun 2023. Layanan ULPK dibuka pada jam kerja di kantor Loka POM, stand pameran di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru. Selain itu, pengambilan survei juga ditunjang oleh program inovasi Patin Balalah (ULPK Keliling) sebanyak 7 kali.

3. Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Terdapat beberapa indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan 3, yaitu:

- a) Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan; Pada tahun 2020, persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tidak mencapai target yaitu 95.95% walaupun demikian kriteria capaian yaitu Baik dan untuk tahun 2021 persentase capaian mengalami kenaikan sebesar 19.8% menjadi 119.05% dengan kriteria capaian yaitu Sangat Baik. Pada tahun 2022 indikator persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan mengalami penurunan sebesar 7.17% menjadi 111.88%, hal ini disebabkan karena beberapa keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/ distribusi belum ditindaklanjuti sampai dengan akhir tahun, tetapi data tetap dimasukkan ke dalam jumlah penyebut sehingga secara perhitungan menyebabkan penurunan capaian total indikator tersebut. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 4,4%



menjadi 116,28% dengan kategori capaian Sangat Baik. Pada Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 100.00% dengan kategori capaian Baik, hal ini dipengaruhi oleh target kinerja yang meningkat sebesar 14.00%.

- b) Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; Pada tahun 2020, persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tidak mencapai target yaitu sebesar 104.28% namun demikian kriteria capaian sudah Baik, untuk tahun 2021 persentase capaian mengalami kenaikan sebesar 38.53% menjadi 133.33% dengan kriteria capaian yaitu Tidak Dapat Disimpulkan. Pada tahun 2022 indikator persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan mengalami penurunan sebesar 13.47% menjadi 119.86%. Hal ini disebabkan karena rendahnya capaian pada jumlah pelaku usaha yang menindaklanjuti hasil inspeksi terutama pada pemeriksaan sarana distribusi pangan karena adanya penggunaan peraturan dan formulir baru yang digunakan sehingga semua hasil inspeksi harus ditindaklanjuti. Meskipun mengalami penurunan capaian kinerja tersebut masih melebihi target dengan kriteria capaian Memenuhi Ekspektasi. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,33% menjadi 121,19%. dengan kategori capaian Tidak Dapat Disimpulkan dikarenakan capaian lebih dari 120%. Pada Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 110.37% dengan kategori capaian Sangat Baik, hal ini dipengaruhi oleh target kinerja yang meningkat sebesar 13.80%.
- c) Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu; Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu selama 5 tahun sama yakni 100.00%
- d) Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan; Pada tahun 2020, persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan tidak mencapai target yaitu sebesar



97.83% dan untuk tahun 2021 persentase capaian mengalami peningkatan sebesar 14.17% menjadi 112.00%. Pada tahun 2022 indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan mengalami peningkatan 4.16% menjadi 116.16% dan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,21% menjadi 120,37% dengan kategori capaian Tidak Dapat Disimpulkan. Pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 11.32% menjadi 109.05%, hal ini dipengaruhi karena terdapat peningkatan target kinerja sebesar 12.30%.

- e) Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan; Pada tahun 2020, persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tidak mencapai target yaitu sebesar 93.62% dan untuk tahun 2021 persentase capaian mengalami peningkatan sebesar 23.86% menjadi 117.48%. Pada tahun 2022 indikator persentase sarana sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan mengalami penurunan 1.48% menjadi 116%, meskipun demikian capaian kinerja tahun 2022 masih melebihi target dan pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 6,35% menjadi 109,65% dengan kategori capaian Sangat Baik.
- f) Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik; Selama periode 3 tahun terakhir (2020-2024) target IKU ini terus mengalami peningkatan bahkan pada tahun 2024 target mencapai target maksimal yakni 100. Namun demikian Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tetap dapat merealisasikan dengan nilai maksimal.
- g) Perentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kab/ Kota; Pada Tahun 2020-2023 belum ada indikator kinerja Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di



provinsi/kabupaten/kota. Pada Tahun 2024 capaian kinerja sebesar 105.26% dengan kategori Sangat Baik.

4. Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Persentase capaian indeks efektivitas KIE fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Persentase capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 124.18% dan terendah pada tahun 2024 sebesar 100.41%. Hal ini dikarenakan target yang setiap tahunnya naik dan jika dilihat data realisasi setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Sehingga walaupun tahun 2024 capaiannya rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun realisasi tahun 2024 paling tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

5. Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk Dan Pengujian Obat Dan Makanan Di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT

Terdapat beberapa indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan 5, yaitu:

- a) Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar; Capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar selama 5 tahun sama yakni 100.00%.
- b) Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar; Capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar selama 5 tahun sama yakni 100.00%.

6. Sasaran Kegiatan 6

Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat Dan Makanan Di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT;



Pada tahun 2020 nilai capaian indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan yaitu 123.46% dengan kriteria capaian Tidak Dapat Disimpulkan dan tahun 2021 nilai capaian indikator ini mengalami penurunan menjadi 103.09% dengan kriteria capaian Baik serta pada tahun 2022 mengalami penurunan capaian menjadi 102.04% dengan kriteria capaian Memenuhi Ekspektasi, kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 101.01% dengan kriteria Sangat Baik.

7. Sasaran Kegiatan 7

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT Yang Optimal

Terdapat beberapa indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan 7, yaitu:

- a) Persentase Implementasi Rencana Aksi RB lingkup wilayah kerja UPT; Selama lima tahun tersebut, target dan realisasi selalu mencapai 100%, dengan persentase capaian yang konsisten pada 100%. Kategori capaian menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu telah memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi, dengan label "Baik" untuk sebagian besar tahun dan "Memenuhi Ekspektasi" pada tahun 2022. Meskipun target dan realisasi terlihat stabil, terdapat variasi dalam jumlah rencana aksi yang ditetapkan setiap tahun. Pada tahun 2020 dan 2021, target rencana aksi tidak ditentukan, sementara pada tahun 2022, 2023, dan 2024, jumlah rencana aksi berturut-turut adalah 50, 41, dan 31.
- b) Nilai AKIP UPT; Pada realisasi tahun 2023 tidak dapat mencapai target, sehingga pada tahun 2024 221 dilakukan revaluasi kembali untuk penurunan target dengan mengacu pada realisasi tahun 2023. Dengan target yang lebih rendah, pada tahun 2024 target dapat tercapai dengan realisasi meningkat 0.72% dari realisasi tahun 2023.
- c) Nilai Pengelolaan Kearsipan; Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan merupakan indikator yang baru dilaksanakan pada tahun 2024 oleh Loka



POM di Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga tidak memiliki perbandingan dengan tahun sebelumnya.

8. Sasaran Kinerja 8

Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Yang Berkinerja Optimal;

Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Tanah Bumbu Tahun 2024 mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 13,24 persen dari 108,33 persen (tahun 2023) menjadi 95,09 persen pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya perubahan *tools* penilaian indeks profesionalitas ASN pada pertengahan tahun 2024, sehingga pengaruh pada realisasi cukup signifikan.

9. Sasaran Kinerja 9

Menguatnya Pengelolaan Data Dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan di Loka POM Di Kabupaten Tanah Bumbu;

Pada indikator kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dalam 3 tahun mencapai realisasi yang sama dan maksimal di nilai 3.00, sehingga kenaikan target setiap tahunnya dengan realisasi yang sama menghasilkan capaian yang menurun setiap tahunnya.

10. Sasaran Kinerja 10

Terkelolanya Keuangan Loka POM di Tanah Bumbu Secara Akuntabel

Terdapat beberapa indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan 10, yaitu:

- a) Nilai Kinerja Anggaran; Pada tahun 2024 mengalami penurunan target, dimana penurunan target ini berdasarkan hasil reuiu Biro Perencanaan dan Keuangan bersama Unit Pengampu. Namun demikian, dalam tiga tahun terakhir realisasi nilai kinerja anggaran terus mengalami peningkatan.
- b) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa; Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa merupakan indikator yang baru dilaksanakan



pada tahun 2024 oleh Loka POM di Kab. Tanah Bumbu, sehingga tidak memiliki perbandingan dengan tahun sebelumnya.

- c) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara; Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa merupakan indikator yang baru dilaksanakan pada tahun 2024 oleh Loka POM di Kab. Tanah Bumbu, sehingga tidak memiliki perbandingan dengan tahun sebelumnya.
- d) Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri; Indikator Nilai persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri merupakan indikator yang baru dilaksanakan pada tahun 2024 oleh Loka POM di Kab. Tanah Bumbu, sehingga tidak memiliki perbandingan dengan tahun sebelumnya

1.2. Aspirasi Stakeholder

Dalam menghadapi tantangan masa depan, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika social ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi. Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang *emergent*, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat. Aspirasi masyarakat juga membantu Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dalam memahami



bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyusun perencanaan program pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Untuk menampung aspirasi ini, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang bertujuan untuk menciptakan forum koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat, menciptakan forum dengar pendapat antara pemerintah, stakeholder terkait, dan masyarakat, membangun pemahaman dan persamaan persepsi kepada stakeholder, dan menetapkan standar pelayanan yang selaras dengan kebutuhan/kepentingan masyarakat.

Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 22 November 2022 dengan melibatkan lintas sektor/stakeholder di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun masukan dan saran yang diperoleh dalam forum tersebut antara lain:

- Penyebaran informasi melalui berbagai media seperti: radio, brosur, penempatan barcode yang berisi produk informasi obat dan makanan di Lokasi keramaian (Saryanfar, ritel, dsb), sebagai pelayanan permintaan informasi dan pengaduan Masyarakat terkait Obat dan Makanan.
- Sosialisasi/ bazar dilakukan dengan melibatkan pelaku usaha local (Pelaksanaan bekerjasama dengan kecamatan terkait).
- Sosialisasi terkait perizinan obat dan makanan ke Tingkat kecamatan untuk meningkatkan ketertarikan Masyarakat terhadap kegiatan BPOM masih kurang.
- MoU bersama Kantor Kementerian Agama Tanah Bumbu dan PKS bersama DPMPTSP Tanah Bumbu dalam hal proses perizinan.



Forum Konsultasi Publik Tahun 2023, dilaksanakan dengan metode Focus Group Discussion (FGD) secara Luring dan Daring (Hybrid) pada tanggal 25 September 2023 dengan peserta terdiri dari perwakilan akademisi, SKPD/Instansi terkait, Organisasi Profesi/Ahli, Masyarakat umum/pengguna layanan dan media massa baik dari Kabupaten Tanah Bumbu maupun Kabupaten Kotabaru. Forum Konsultasi Publik Tahun 2023 mendapat saran dan masukan antara lain:

- Meningkatkan kegiatan sosialisasi Obat dan Makanan ke Masyarakat dengan bekerja sama dengan Desa/ Komunitas yang ada di Kecamatan/Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.
- Meningkatkan pembinaan dan pendampingan UMKM dalam rangka memperoleh Nomor Izin Edar BPOM.
- Melakukan pertukaran informasi data dan informasi khususnya terkait UMKM yang belum mendapatkan Nomor Izin Edar BPOM dan Sertifikasi Halal.
- Melakukan penertiban pelaku usaha *frozen food* khususnya produk pentol.

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan Forum Konsultasi Publik Tahun 2024 pada tanggal 23 September 2024 bertempat di Aula Bersujud I Kantor Bupati Tanah Bumbu, dengan peserta berasal dari Instansi Pemerintah, Akademisi, Media Massa, Pelaku Usaha, Masyarakat/Komunitas/ Organisasi. Terdapat beberapa saran dan masukan yang didapat sebagai berikut:

- Melakukan pemutakhiran terhadap produk hukum yang tercantum dalam standar pelayanan publik.
- Melakukan pemutakhiran terhadap kanal layanan khususnya pada komponen service delivery Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi.



- Menambahkan inovasi layanan Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Obat dan Makanan Keliling (Patin Balalah) sebagai salah satu layanan publik Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.
- BPOM bekerjasama dengan pemangku kepentingan untuk membangun jejaring informasi obat dan makanan: forum anak daerah, Dinas P3A2KB, Diskominfo SP, HIPMIKINDO termasuk jejaring admin media sosial di wilayah kerja.
- Kolaborasi antara BPOM dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas KOMINFO SP, Kementerian Agama untuk kegiatan seperti pengawasan jajanan anak sekolah, penanganan stunting dan pengawasan UMKM.

Forum Konsultasi Publik Tahun 2025, dilaksanakan pada tanggal 22 September 2025 di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Kotabaru, secara *Hybrid* dengan peserta berasal dari Instansi Pemerintah, Akademis, Media Massa, Pelaku Usaha, Komunitas/Organisasi Masyarakat dan Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 2025 ini terkait dengan Peningkatan Pelayanan Publik Untuk Pengarustamaan Gender dan Inklusi Sosial, adapun masukan dan saran untuk Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut:

- Melakukan Pemutakhiran terhadap produk hukum yang tercantum dalam standar pelayanan publik.
- Melakukan pemutakhiran terhadap jenis layanan.
- Menambahkan penjelasan layanan kelompok rentan pada komponen service delivery.
- Petugas pelayanan publik mengikuti pelatihan Bahasa isyarat.
- Pengadaan sarana dan prasarana untuk kelompok rentan

Tindaklanjut pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu ini dapat membantu Loka POM di Kabupaten



Tanah Bumbu dalam reviu pedoman terkait Peningkatan Pelayanan Publik untuk Pengarustamaan Gender dan Inklusi Sosial.

1.3. Potensi dan Permasalahan

Dalam perumusan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu untuk periode 2025-2029, pemahaman terhadap potensi dan tantangan di wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru menjadi faktor kunci. Strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan harus dirancang agar tidak hanya efektif dan berkualitas, tetapi juga adaptif terhadap perubahan kondisi kesehatan di tingkat lokal dan nasional. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan keamanan, mutu, dan efikasi produk kesehatan dan pangan di wilayah ini, Loka POM memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks untuk melindungi kesehatan masyarakat. Ancaman kesehatan yang dapat muncul di daerah ini menuntut sistem pengawasan yang siap dan responsif.

Pengawasan produk farmasi dan pangan olahan di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru di masa mendatang memerlukan inovasi dan penyesuaian yang dapat merespons dinamika global serta tantangan kesehatan di tingkat daerah, termasuk perkembangan industri dan teknologi yang pesat. Dengan menggali potensi yang dapat dimaksimalkan serta mengatasi tantangan yang ada, Loka POM dapat menyusun strategi yang efektif guna meningkatkan kualitas layanan publik serta menjamin pengawasan yang lebih baik di wilayah kerja. Rencana strategis ini akan menjadi landasan bagi Loka POM dalam menghadapi dinamika yang ada, memperkuat sistem pengawasan, dan menjawab ekspektasi masyarakat terhadap ketersediaan produk farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Memanfaatkan potensi serta menyelesaikan tantangan dalam konteks pembangunan daerah dan nasional merupakan fokus utama dalam



penyusunan Rencana Strategis Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2029. Strategi yang dikembangkan harus mampu memberikan layanan publik yang berkualitas serta mengantisipasi berbagai ancaman kesehatan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, selaras dengan program pembangunan daerah di sektor kesehatan. Melalui pendekatan kolaboratif dengan para pemangku kepentingan, Loka POM diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan produk farmasi dan pangan olahan serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Rencana strategis yang disusun secara menyeluruh dan fleksibel akan membantu Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dalam menghadapi tantangan yang ada maupun yang akan datang, serta berkontribusi dalam mendukung agenda pembangunan daerah. Fokus utama adalah memastikan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru mendapatkan akses terhadap produk farmasi dan pangan yang aman serta berkualitas, mendukung terciptanya kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu akan menghadapi berbagai potensi dan tantangan yang cukup kompleks. Sebagai bagian dari langkah strategis dalam perencanaan jangka menengah, pendekatan analisis SWOT akan digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang dapat memengaruhi pengawasan produk farmasi dan pangan olahan di wilayah ini. Dengan demikian, strategi yang dihasilkan akan diarahkan untuk mengoptimalkan potensi dan mengatasi tantangan guna menjamin keamanan dan mutu produk bagi masyarakat.

1.3.1 Kekuatan (Strength)

Analisis terhadap kondisi internal organisasi bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Langkah ini penting untuk memahami dan mengevaluasi



sumber daya, kapabilitas, serta aspek strategis yang memberikan keunggulan bagi Loka POM dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerjanya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya berperan dalam menjaga efektivitas pengawasan yang telah berjalan, tetapi juga menjadi landasan bagi perencanaan pengembangan strategis yang bertujuan untuk memperkuat posisi Loka POM di masa mendatang. Dengan memahami kekuatan yang dimiliki, Loka POM dapat lebih siap menghadapi tantangan yang ada serta memanfaatkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Kekuatan yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan aset berharga yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, serta menjadi pijakan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi dalam menjamin keamanan, mutu, dan efikasi produk farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja.

1. Komitmen Kepemimpinan Yang Kuat

Untuk membangun pondasi yang kokoh dalam mencapai kesuksesan jangka panjang, komitmen kepemimpinan di Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu telah diperlihatkan dengan visi dan tekad yang jelas serta penerapan budaya kerja BPOM melalui PIKKIR, yaitu Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerjasama Tim, Inovatif, dan Responsif/Cepat Tanggap.

Kepemimpinan yang strategis, progresif, dan inovatif dianggap sangat penting dalam mengarahkan Loka POM untuk mampu menghadapi tantangan lingkungan yang terus berkembang dengan tingkat kompleksitas dan dinamika yang semakin meningkat. Dengan fokus utama pada pengawasan obat dan makanan yang aman serta berkualitas, kepemimpinan memastikan bahwa Loka POM tidak hanya menyesuaikan diri dengan tantangan yang ada saat ini, tetapi juga bersiap menghadapi perubahan yang akan datang. Melalui perumusan strategi yang matang dan keputusan-keputusan yang bijaksana, upaya dilakukan untuk meningkatkan standar pengawasan, memperkenalkan



metode baru, serta memperkuat sistem pengawasan guna melindungi kesehatan masyarakat.

Inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh kepemimpinan Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu tidak hanya memastikan bahwa lembaga ini tetap relevan dengan perkembangan yang ada, tetapi juga memperkuat tingkat kepercayaan masyarakat dan UMKM terhadap Loka POM. Sejumlah penghargaan yang diterima oleh Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu dalam keberhasilan inovasi yang di inisiasi oleh pimpinan menjadi bukti nyata atas komitmen lembaga melakukan perbaikan dan pengembangan, antara lain:

- a. Peringkat Kedua Pelaksanaan Kinerja Anggaran – Diberikan atas pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.
- b. Top 8 Inovasi Pelayanan Publik – Diperoleh berkat program "BPOM Lebih Dekat" yang dinilai inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Predikat Informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik – Diberikan karena tingkat keterbukaan informasi yang sangat baik.
- d. Pengelolaan BMN & Keuangan yang Efisien – Terbaik Ketiga – Penghargaan ini diberikan atas pengelolaan Barang Milik Negara dan keuangan yang efisien.
- e. HR Manager Terbaik Kedua – Diperoleh sebagai penghargaan atas pengelolaan sumber daya manusia yang unggul.
- f. Kearsipan Terbaik Ketiga – Kategori AA Memuaskan – Penghargaan ini diberikan atas pengelolaan arsip yang tertib dan terorganisir.
- g. Kinerja Memuaskan pada Tingkat Loka – Penghargaan ini mengapresiasi pencapaian kinerja yang memadai dan konsisten.
- h. Pengelolaan Rekening Pemerintah Terbaik I dari KPPN Kotabaru – Diperoleh atas pengelolaan rekening pemerintah yang baik.
- i. Pelayanan Prima dalam Pelayanan Publik – Penghargaan yang diberikan untuk pelayanan publik yang berkualitas dan responsif.



2. Kerja Sama Lintas Sektor aktif dan jaringan kerja sama yang solid

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas strategis yang berdampak langsung terhadap masyarakat, perlindungan konsumen, serta daya saing produk nasional. Dalam menjalankan fungsinya, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu telah mengembangkan kerja sama lintas sektor dan jaringan kerja sama kuat dan berkesinambungan. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu telah membangun kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, antara lain kementerian/lembaga pemerintah daerah, akademisi, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha dan organisasi kemasyarakatan. Kerja sama ini dilakukan melalui sinergi program strategis, pertukaran informasi yang cepat dan akurat yang dapat meningkatkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dalam mengawasi produk obat dan makanan yang beredar di wilayah kerja. Kerja sama juga dilakukan untuk peningkatan pengetahuan masyarakat serta dukungan pembangunan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan.

Kerja sama yang solid ini direalisasikan dalam bentuk MoU kepada pemerintah daerah di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yakni Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru. Kemudian diturunkan dalam bentuk kegiatan kolaborasi dengan lintas sektor terkait.

Beberapa kerjasama yang telah terjalin dengan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan terkait pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembinaan terhadap sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi pangan olahan industri rumah tangga, selain itu Loka POM juga bekerjasama dengan Dinas Perikanan terkait pendampingan UMKM yang dapat meningkatkan produk UMKM terdaftar BPOM dan PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP) dalam pelaksanaan kegiatan BPOM Sailing yaitu publikasi informasi di atas kapal ferry yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait keamanan obat dan makanan.



3. Kompetensi SDM

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu didukung oleh SDM yang berkompetensi dan berkomitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan Obat dan Makanan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan teknis mendalam dan keterampilan analitis yang moderen, kualitas sumber daya manusia di Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu mencerminkan standar yang tinggi dibidangnya.

Pengalaman dan kompetensi teknis yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan aset penting dalam evaluasi dan pengawasan produk. SDM Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari Pegawai dengan kompetensi teknis dan spesialisasi jabatan yang spesifik. Sampai dengan tahun 2025 SDM Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari 23 pegawai dengan rincian : Kepala UPT 1 orang, Jabatan fungsional teknis 14 orang, Arsiparis 1 orang, Pengelola layanan operasional 1 orang, Pranata SDM terampil 1 orang, APBN 2 orang, Pranata APBN 1 orang, Fungsional umum 1 orang dan pranata komputer 1 orang. Beberapa pegawai baru telah mengikuti kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sehingga dapat memenuhi proporsi SDM yang dibutuhkan Loka POM.

4. Pemanfaatan Teknologi Dan Inovasi

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan pemanfaatan teknologi yang sangat responsif dalam mendukung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di masyarakat. Sumber daya yang dimiliki telah beradaptasi dengan cepat terhadap digitalisasi, yang terbukti melalui pengembangan aplikasi internal berbasis web, seperti tatambasiading.com. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, barang persediaan, dokumentasi kinerja, arsip, hingga pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, terutama dalam hubungan dengan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, Loka POM juga memperkenalkan berbagai inovasi pelayanan publik yang memberikan solusi



atas tantangan dalam pengawasan obat dan makanan, di antaranya adalah "Rindu Alam" (Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Sarana dan Tindak Lanjut Obat dan Makanan) yang mencakup data seluruh sarana yang telah dilakukan pengawasan atau pemeriksaan, "SIRING PAGATAN" (Sistem Monitoring CAPA Daring Obat dan Makanan) yang dapat memberikan kemudahan pelaku usaha dalam membalas CAPA hasil pemeriksaan sarana tersebut, dan "BPOM Lebih Dekat" yang meliputi program BPOM Tanbu Go untuk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada komunitas. Inovasi ini juga mencakup layanan KIE di atas kapal feri, pusat informasi dan pengaduan obat dan makanan keliling, serta penyebaran informasi ke daerah terpencil dan kepulauan.

Beberapa inovasi tersebut mampu mendukung efisinesi dalam pengawasan dan pelayanan publik. Berkat inovasi-inovasi tersebut, Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu berhasil memperoleh pengakuan tingkat nasional dengan masuk dalam Top 8 Inovasi Terbaik di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Semua ini mencerminkan komitmen Loka POM dalam memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk menjawab tantangan yang ada dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam menjaga kesehatan masyarakat.

5. Peningkatan Kapasitas Pengujian

Penguatan kapasitas pengujian di Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu merupakan langkah strategis yang signifikan dalam memperkuat fungsi pengawasan obat dan pangan olahan. Sebelumnya, Loka POM hanya memiliki kemampuan untuk melakukan uji rapid test kit pada pangan olahan dengan parameter seperti boraks, formalin, rhodamin B, methanyl yellow, dan DNA babi. Namun, seiring dengan perkembangan kapasitasnya, Loka POM kini juga mampu melaksanakan uji rapid test kit untuk produk sediaan farmasi, khususnya obat-obatan. Perluasan kemampuan uji ini sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang memerlukan konfirmasi laboratorium dengan hasil uji yang cepat dan akurat. Lebih lanjut, untuk



mendukung peningkatan kualitas pengujian, seluruh sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam proses pengujian telah dilengkapi dengan kompetensi yang memadai serta sertifikasi yang relevan, sehingga dapat menjalankan tugas pengujian sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan.

Dengan adanya penguatan ini, Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan pengawasan, tetapi juga memperkuat posisi lembaga sebagai instansi yang profesional dan terpercaya dalam bidang pengujian obat dan pangan olahan. Peningkatan jumlah UMKM pangan lokal yang membutuhkan pengujian produk dapat diakomodir dengan mengkoordinasikan ke Balai Koordinator terkait parameter uji produk.

6. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu aktif dalam mengedukasi dan memberdayakan masyarakat terkait keamanan obat dan makanan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan produk yang beredar di wilayah kerja. Melalui program dan kampanye edukasi yang terstruktur, Loka POM berusaha menyampaikan informasi yang relevan mengenai pentingnya konsumsi obat dan makanan yang aman dan berkualitas. Salah satu inovasi yang menjadi fokus utama adalah program BPOM Lebih Dekat, yang merupakan bagian dari upaya untuk mendekatkan layanan pengawasan kepada masyarakat.

Melalui BPOM Lebih Dekat, Loka POM mengedukasi masyarakat dengan cara yang lebih langsung dan praktis, termasuk melalui komunikasi informasi dan edukasi (KIE) di komunitas-komunitas lokal, pelayanan KIE di atas kapal feri, serta pengadaan pusat informasi keliling dan penyebaran informasi ke daerah-daerah terpencil di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru. Program nasional seperti Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (Gema Cermat) atau Desa Pangan Aman baru akan dilakukan di tahun 2025.



Keterlibatan masyarakat dalam program-program ini tidak hanya memperkuat sistem pengawasan dari dalam, tetapi juga membangun kesadaran yang lebih luas mengenai pentingnya memilih produk yang aman dan berkualitas. Masyarakat di daerah ini turut berperan penting dalam mengawasi produk yang beredar dan melaporkan produk yang mencurigakan, sehingga dapat membantu BPOM dalam merespons lebih cepat terhadap potensi risiko yang mungkin muncul. Inisiatif edukasi dan pemberdayaan ini juga mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari sistem pengawasan yang lebih menyeluruh, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi seluruh komunitas. Kemitraan antara Loka POM dan masyarakat, terutama melalui inovasi BPOM Lebih Dekat, merupakan langkah strategis dalam menjaga keamanan produk obat dan makanan di tingkat regional Tanah Bumbu dan Kotabaru.

7. Infrastruktur Pelayanan Publik yang Memadai

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan visi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, infrastruktur pelayanan publik disediakan guna menunjang pengawasan obat dan makanan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Infrastruktur pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu meliputi gedung kantor yang terdapat sarana prasarana pendukungnya. Gedung kantor memiliki peranan penting dalam mendukung operasional Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu secara keseluruhan, dan berfungsi sebagai sarana koordinasi dan pengambilan keputusan strategis.

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan akan gedung kantor melalui fasilitasi pengadaan barang/jasa, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring. Selain keberadaan gedung kantor, sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik yang memadai juga berperan penting dalam memastikan pelaksanaan visi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dengan optimal. Sarana dan Prasarana yang dimaksud, meliputi loket pelayanan publik, ruang tunggu konsumen yang



dilengkapi area ruang tunggu disabilitas, ruang bermain anak, ruang laktasi, pemeliharaan gedung, kendaraan serta fasilitas perkantoran termasuk di dalamnya meubelair, dan media informasi digital.

8. Kemampuan Adaptasi Dengan Perkembangan Terkini

Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan kemampuan adaptasi yang sangat baik terhadap perkembangan terkini, baik dalam pengawasan obat dan makanan maupun dalam mendukung inisiatif kesehatan masyarakat. Sebagai bagian dari upaya terpadu dalam penanggulangan stunting, Loka POM berperan aktif dan responsif dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di daerah, berkontribusi dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program penanganan stunting, mulai dari rembuk stunting, intervensi serentak penurunan stunting (ISPS), hingga pemantauan dan evaluasi program di tingkat daerah. Selain itu, Loka POM juga memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal, khususnya di sektor perikanan, dengan mendukung UMKM pangan olahan hasil perikanan untuk memperoleh izin edar BPOM. Langkah ini dilakukan melalui kerjasama yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti Dinas Perikanan dan Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, guna mendorong pemberdayaan ekonomi lokal sekaligus memastikan kualitas dan keamanan produk yang beredar.

Selanjutnya, Loka POM Tanah Bumbu juga menunjukkan proaktivitas yang tinggi dalam menangani isu-isu kesehatan yang sedang berkembang, seperti pengawasan terhadap Antimicrobial Resistance (AMR). Dalam hal ini, Loka POM menjalin kerjasama dengan berbagai sektor terkait, termasuk Ikatan Apoteker Indonesia dan Dinas Perikanan, untuk melaksanakan pengawasan yang lebih efektif. Selain itu, Loka POM juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan melalui program cyber patrol. Dengan menjalin kemitraan dengan perusahaan ekspedisi, kepolisian, dan masyarakat, Loka



POM memperkuat upaya penelusuran pengiriman obat-obatan tertentu yang rentan disalahgunakan dalam sistem jual beli online.

Semua inisiatif ini mencerminkan kesiapan Loka POM dalam mengantisipasi dan merespons perkembangan yang terus berubah, serta komitmennya dalam memastikan kesehatan masyarakat melalui pendekatan yang lebih terkoordinasi dan berbasis kolaborasi lintas sektor. Bentuk nyata adaptasi terhadap perubahan kebijakan meliputi perubahan perilaku dan pola kerja, seperti peningkatan literasi digital dengan mengikuti pelatihan terkait literasi digital, penggunaan teknologi baru, dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan.

1.3.2 Kelemahan (Weakness)

Seiring dengan perkembangan dan kompleksitas yang terus meningkat dalam pengawasan obat dan makanan di tingkat regional, Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Beberapa aspek dalam operasional pengawasan menunjukkan adanya kelemahan yang dapat memengaruhi kinerja Loka POM dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Identifikasi serta pemahaman terhadap kelemahan-kelemahan tersebut menjadi langkah krusial untuk memperbaiki dan memperkuat upaya Loka POM dalam melindungi masyarakat dari risiko yang timbul akibat produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan. Oleh karena itu, fokus pada area-area yang memerlukan perbaikan ini akan menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas pengawasan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Tantangan terkait keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) di Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu berdampak signifikan terhadap pengawasan obat dan makanan, terutama dalam mengawasi daerah-daerah terpencil, kepulauan, dan pedalaman yang memiliki akses terbatas.



Ketidakseimbangan antara SDM dengan beban pengawasan ini dapat mengakibatkan penundaan dalam pelaksanaan inspeksi dan pengawasan produk, memungkinkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas beredar lebih lama di pasaran. Loka POM sering kali menghadapi kesulitan dalam mendeteksi dan menanggapi isu-isu terkait keamanan produk secara cepat. Beberapa proses bisnis ketatausahaan juga belum dapat diakomodir secara penuh oleh SDM bidang bersangkutan, sehingga masih ditangani oleh SDM teknis pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, hal tersebut berpotensi untuk meningkatkan beban kerja yang overload pada beberapa pegawai.

Selain itu, keterbatasan jumlah SDM turut menghambat upaya edukasi kepada masyarakat, khususnya di daerah dengan tingkat literasi rendah, mengenai pentingnya konsumsi produk yang aman dan berkualitas. Hal ini juga mempengaruhi kemampuan Loka POM untuk mengadopsi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan, yang berujung pada penurunan efisiensi dan efektivitas operasional. Dampak dari kelemahan ini tidak hanya berdampak pada operasional internal Loka POM, tetapi juga mengancam perlindungan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk segera mengatasi tantangan terkait SDM guna memastikan kualitas pengawasan yang optimal di wilayah Tanah Bumbu dan Kotabaru.

2. Gap Kompetensi Pegawai

Kesenjangan dalam tingkat kompetensi di antara pegawai Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu merupakan isu penting yang memerlukan penanganan serius guna memastikan pengawasan obat dan makanan berjalan dengan optimal. Ketidakseimbangan dalam hal keahlian ini dapat mengarah pada ketidakefisienan dalam alur kerja, di mana sebagian pegawai mungkin terbebani dengan jumlah tugas yang terlalu banyak, sementara yang lainnya belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan staf, tetapi juga berisiko



menurunkan kualitas kinerja secara keseluruhan, karena tugas pengawasan yang vital mungkin tidak dapat diselesaikan sesuai dengan standar yang diharapkan atau dalam waktu yang tepat. Kesenjangan kemampuan ini juga menantang konsistensi dan kualitas prosedur pengawasan yang harus dijalankan dengan ketelitian.

Apabila tidak segera ditangani, kesenjangan kompetensi antar pegawai di Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu dapat menghambat efektivitas lembaga dalam menjaga standar keamanan obat dan makanan. Pengawasan yang baik memerlukan pemahaman yang mendalam serta keterampilan yang seragam di antara seluruh pegawai untuk memastikan semua regulasi dan standar dapat dipatuhi dengan baik. Tanpa adanya keseragaman kompetensi, Loka POM berisiko menghadapi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan yang dapat berujung pada ancaman bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi kesenjangan kompetensi ini dengan pelatihan yang seragam dan berkelanjutan untuk menjaga kredibilitas dan integritas lembaga.

Sebagai bagian dari implementasi sistem merit di Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu, pengembangan kompetensi SDM menjadi perhatian utama, selain aspek kualifikasi dan kinerja. Berdasarkan evaluasi kompetensi yang dilaksanakan secara periodik antara 2020-2024, terdapat sejumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan, sementara sebagian lainnya masih perlu meningkatkan keterampilan sesuai dengan standar yang berlaku.

Kompetensi penguji laboratorium hanya dimiliki oleh dua pegawai sedangkan dua pegawainya belum memiliki kompetensi atau belum mengikuti kompetensi secara langsung. Selain itu beberapa kompetensi yang perlu dikembangkan seperti penggunaan aplikasi pengawasan, komunikasi risiko.



3. Layanan Perizinan

Prosedur dan alur perizinan untuk produk sediaan farmasi dan pangan di tingkat daerah masih sering dianggap kompleks dan berbelit oleh pelaku usaha. Hal ini menjadi salah satu tantangan utama yang berdampak pada rendahnya tingkat sertifikasi produk di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Proses yang dianggap tidak efisien ini dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan pelaku usaha, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan sektor industri farmasi dan pangan di daerah. Keterbatasan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, kurangnya sosialisasi yang efektif, serta keterbatasan dalam pendampingan teknis turut memperburuk kondisi ini, menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Hambatan administratif ini tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga berimplikasi pada efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu. Minimnya produk yang tersertifikasi memperbesar potensi peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas, sehingga meningkatkan risiko terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih strategis dan berkelanjutan untuk menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan pemahaman pelaku usaha melalui edukasi yang komprehensif, serta memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait guna menciptakan ekosistem perizinan yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Permasalahan yang paling sering ditemui terkait pemahaman pelaku usaha dalam mendaftarkan produk melalui aplikasi sehingga menghambat proses pendaftaran produk.



4. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik

Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu mengidentifikasi sejumlah tantangan krusial yang perlu perhatian serius untuk memastikan kelancaran pelayanan publik yang berkualitas. Gedung kantor Loka POM yang saat ini masih disewa dalam bentuk ruko dengan ruang terbatas menghambat efisiensi operasional. Keterbatasan ruang ini mempengaruhi penyediaan fasilitas yang memadai bagi masyarakat, terutama kelompok rentan yang memerlukan pelayanan lebih intensif, sehingga memengaruhi kualitas dan aksesibilitas layanan yang diberikan.

Selain itu, kondisi ruang laboratorium pengujian yang belum memenuhi standar keselamatan kerja menjadi perhatian utama. Ruang yang tidak terstandarisasi dapat berisiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja petugas, serta berdampak pada pengelolaan limbah pengujian yang tidak sepenuhnya terkelola dengan baik, berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Di samping itu, kapasitas tenaga listrik yang ada saat ini tidak sebanding dengan beban daya yang diperlukan, mengakibatkan ketidakseimbangan dalam mendukung operasional yang membutuhkan daya listrik stabil, seperti peralatan laboratorium yang krusial.

Lebih lanjut, ketidaktersediaan area *public space*, dimana dengan adanya area ini dapat mendorong interaksi dan kolaborasi sesama pegawai sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi. Oleh karena itu, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai adalah langkah strategis untuk memperkuat kualitas pelayanan, baik bagi konsumen maupun bagi pegawai, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan mendukung.



5. Anggaran Sarana dan Prasarana

Keterbatasan anggaran di Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu menjadi salah satu tantangan utama dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan secara optimal. Sebagai unit yang berada di tingkat regional, alokasi dana yang tersedia sering kali belum sejalan dengan kebutuhan operasional di lapangan, terutama dalam menghadapi kondisi geografis yang kompleks seperti wilayah kepulauan, pelosok, dan pedalaman. Terbatasnya anggaran ini berdampak pada keterbatasan dalam pengadaan sarana dan prasarana pendukung, seperti fasilitas laboratorium yang memadai, kendaraan operasional untuk menjangkau daerah terpencil, serta infrastruktur teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung pengawasan berbasis digital. Selain itu, keterbatasan anggaran juga membatasi pelaksanaan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, yang merupakan langkah krusial dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi produk obat dan makanan yang aman. Tidak hanya itu, ketergantungan pada anggaran dari pusat yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan spesifik di tingkat daerah juga menjadi tantangan tersendiri dalam fleksibilitas pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, upaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, menjalin kerja sama dengan pihak terkait, serta advokasi untuk peningkatan alokasi anggaran menjadi langkah strategis yang perlu terus dilakukan guna memastikan efektivitas dan efisiensi pengawasan di wilayah Tanah Bumbu dan Kotabaru. Pada saat ini Loka POM memiliki keterbatasan anggaran untuk sarana dan prasarana, hal ini dikarenakan fokus pada anggaran pembangunan Gedung kantor di tahun 2026.

1.3.3 Peluang (Opportunity)

Peluang dalam pengawasan obat dan makanan di tingkat daerah, khususnya di Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, mencerminkan potensi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas cakupan layanan dan



meningkatkan efektivitas pengawasan. Pemanfaatan peluang ini dapat mendorong Loka POM menjadi institusi yang lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi tantangan di wilayah kerjanya, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap jaminan keamanan produk yang beredar. Dengan menggali peluang yang ada, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dapat berperan lebih aktif dalam memastikan pengawasan yang selaras dengan perkembangan standar regulasi dan kebutuhan lokal. Berikut adalah berbagai peluang yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat peran dan kontribusi Loka POM di tingkat daerah.

1. Kolaborasi Dengan Stakeholder

Kolaborasi dengan pemangku kepentingan merupakan salah satu peluang strategis bagi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya. Selama lima tahun terakhir, Loka POM telah aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk UMKM sediaan farmasi dan pangan, institusi pendidikan, serta pemerintah daerah dalam mendukung program pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Dukungan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga membangun ekosistem yang kondusif bagi penerapan standar keamanan produk yang lebih baik. Berbagai inovasi yang telah diinisiasi oleh Loka POM juga mendapat apresiasi dari pemerintah daerah, yang semakin memperkuat posisi Loka POM sebagai mitra strategis dalam pengawasan pangan dan obat di tingkat daerah.

Kesepakatan kerja sama yang telah terjalin dengan dua kabupaten, yaitu Kotabaru dan Tanah Bumbu, merupakan langkah maju dalam memperkuat sinergi lintas sektor. Meskipun perjanjian kerja sama ini akan berakhir pada tahun 2024, terdapat peluang besar untuk memperpanjang atau memperbaruinya guna mendukung program pengawasan yang lebih komprehensif dalam lima tahun ke depan. Kolaborasi yang telah terbentuk ini memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan berbagai program prioritas,



seperti Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), Program Pasar Aman Berbasis Komunitas (PABK), serta program strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, termasuk Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk sekolah, pesantren, hingga posyandu.

Melalui kemitraan yang erat dengan para pemangku kepentingan, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki kesempatan untuk memperluas jangkauan pengawasan, meningkatkan kapabilitas SDM melalui pertukaran informasi dan praktik terbaik, serta mempercepat implementasi program-program inovatif yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Kolaborasi yang berkelanjutan ini juga akan memastikan bahwa standar pengawasan yang diterapkan selaras dengan perkembangan regulasi dan inovasi di tingkat regional maupun nasional, sehingga mampu memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat di wilayah kerja Loka POM.

Kegiatan lintas sektor dengan KODIM, Dinas Kesehatan, Pemerintah daerah setempat dalam mendukung isu strategis nasional seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan pengawasan lintas sektor telah dilakukan setiap launching dapur SPPG.

2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan merupakan peluang strategis bagi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu untuk memperkuat perannya dalam pengawasan kesehatan publik. Edukasi yang efektif kepada masyarakat menjadi kunci dalam menekan risiko yang ditimbulkan oleh konsumsi produk yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai kanal komunikasi, seperti media sosial, seminar, lokakarya, serta kampanye publik, Loka POM dapat menyampaikan informasi yang relevan dan mudah dipahami, sehingga masyarakat tidak hanya lebih sadar akan pentingnya keamanan pangan dan obat, tetapi juga terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan produk di lingkungan mereka.



Berdasarkan survei yang dilakukan, capaian indeks efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di wilayah kerja Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2024, indeks efektivitas KIE mencapai 95,982 yang masuk dalam kategori “Sangat Efektif.” Data ini menunjukkan bahwa upaya edukasi yang telah dilakukan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait keamanan obat dan makanan. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap kegiatan KIE, yang memerlukan upaya lebih lanjut dalam pengembangan konsep kegiatan, penyusunan materi edukatif yang lebih menarik, pemilihan narasumber yang relevan, serta penggunaan media yang lebih efektif.

Secara strategis, peningkatan kesadaran masyarakat ini berimplikasi pada meningkatnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan yang berlaku. Dengan masyarakat yang lebih teredukasi, kepatuhan terhadap regulasi akan semakin tinggi, yang pada akhirnya dapat mengurangi risiko peredaran produk ilegal dan berbahaya di pasaran. Lebih jauh, sinergi yang lebih kuat antara masyarakat dan Loka POM akan menciptakan sistem pengawasan yang lebih responsif, di mana masyarakat dapat menjadi mitra aktif dalam melaporkan potensi pelanggaran. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak positif pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memperkuat citra Loka POM sebagai lembaga pengawas yang profesional, kredibel, dan terpercaya di tingkat regional.

Melakukan KIE dengan menempelkan poster pada angkutan umum terkait CEK KLIK dan *Anti Microbial Resistent*. Selain itu setiap kegiatan pengawasan dan pelayanan publik yang dilakukan telah di posting di media sosial. Loka POM juga hadir pada setiap acara pemerintah daerah ke daerah-daerah terpencil untuk jemput bola pelayanan publik.



3. Peningkatan Klasifikasi UPT

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki peluang strategis untuk meningkatkan klasifikasinya dari unit pelaksana teknis (UPT) eselon IV dengan jabatan struktural pengawas menjadi Balai POM dengan status eselon III pada level administrator dalam lima tahun ke depan. Peningkatan ini merupakan langkah signifikan dalam memperkuat peran dan kapabilitas lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan di daerah. Pada tahun 2024, Loka POM Tanah Bumbu telah berhasil melampaui nilai minimum yang dipersyaratkan untuk klasifikasi sebagai Balai POM, yakni sebesar 0.444. Dengan tren kinerja yang terus meningkat, disertai dengan bertambahnya jumlah sarana yang diawasi serta peningkatan jumlah sertifikasi yang diperoleh organisasi, nilai klasifikasi ini diproyeksikan akan terus bertumbuh secara progresif dalam lima tahun mendatang.

Peningkatan status kelembagaan ini tidak hanya berdampak pada aspek internal organisasi, tetapi juga berpotensi meningkatkan kepercayaan dan persepsi positif dari para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah. Status yang lebih tinggi akan memperkuat posisi Loka POM sebagai mitra strategis dalam pengawasan obat dan makanan, yang pada gilirannya dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dan mendalam dengan berbagai pihak. Selain itu, perubahan klasifikasi ini biasanya diiringi dengan peningkatan alokasi sumber daya, baik dalam bentuk tambahan tenaga SDM yang lebih kompeten, alokasi anggaran yang lebih memadai, hingga kewenangan yang lebih luas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian, peningkatan klasifikasi ini akan berdampak langsung pada optimalisasi kinerja pengawasan di wilayah kerja, memungkinkan pengawasan yang lebih efektif, responsif, dan berdaya guna dalam melindungi masyarakat dari risiko peredaran produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu.



Secara keseluruhan, peluang peningkatan klasifikasi UPT ini menjadi momentum strategis yang harus dioptimalkan dengan memperkuat kinerja kelembagaan, meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dan sektor terkait, serta terus berinovasi dalam program-program pengawasan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Peningkatan klasifikasi upt akan berdampak pada penguatan sistem manajemen kinerja Loka POM untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

4. **Pembangunan Gedung Pelayanan Publik Dan Laboratorium**

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki peluang strategis untuk merealisasikan pembangunan gedung pelayanan publik dan laboratorium pengujian sediaan farmasi serta pangan olahan sebagai langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, Loka POM telah berhasil merancang rencana pembangunan yang komprehensif di atas lahan hibah yang telah diperoleh dari pemerintah daerah, mencerminkan dukungan kuat dari pemangku kepentingan lokal terhadap penguatan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah ini.

Ke depan, tantangan utama yang harus dihadapi adalah memastikan tersedianya alokasi anggaran yang memadai serta pengawalan terhadap proses realisasi pembangunan agar dapat diwujudkan dalam bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Upaya ini memerlukan perencanaan yang matang, kolaborasi yang erat dengan pihak terkait, serta komitmen yang kuat untuk menjamin setiap tahapan berjalan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku.

Terwujudnya gedung pelayanan publik dan laboratorium yang mandiri (tidak lagi bergantung pada sistem sewa) akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang lebih optimal, profesional, dan berkelanjutan. Dengan fasilitas yang representatif, Loka POM akan mampu menyediakan layanan yang lebih komprehensif, mulai dari pengujian yang



lebih akurat dan kredibel hingga kemudahan akses bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan. Selain itu, keberadaan laboratorium yang terstandar juga akan memperkuat peran Loka POM dalam mendukung pengawasan berbasis risiko yang lebih efektif serta memperluas cakupan sertifikasi produk lokal sesuai standar nasional dan internasional. Selain itu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan melalui pemanfaatan teknologi digital dan sinergi dengan berbagai instansi serta pemangku kepentingan lainnya. Sehingga dapat menyederhanakan proses pelayanan, meningkatkan transparansi, mempercepat respons, dan memperkuat pengawasan obat dan makanan secara menyeluruh, mulai dari registrasi hingga pasca-edar.

Peluang ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan Loka POM Tanah Bumbu menuju institusi yang lebih mandiri, profesional, dan berdaya saing dalam mendukung visi besar Badan POM untuk memastikan keamanan dan mutu obat serta makanan yang beredar di masyarakat.

5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dalam lima tahun ke depan, peluang pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu menjadi salah satu aspek strategis yang dapat mendukung peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja. Dengan terus berkembangnya regulasi serta dinamika industri farmasi dan pangan, diperlukan SDM yang memiliki kompetensi tinggi dalam memahami dan menerapkan standar keamanan yang berlaku. Melalui program pelatihan berkelanjutan, baik yang diselenggarakan oleh BPOM pusat maupun kerja sama dengan lembaga nasional dan internasional, Loka POM Tanah Bumbu dapat meningkatkan kapasitas pegawainya dalam hal pengawasan berbasis risiko, audit kepatuhan, serta pemanfaatan teknologi pengujian yang lebih modern.

Selain pelatihan teknis, peningkatan kapasitas SDM juga dapat dilakukan melalui program sertifikasi profesional di bidang pengawasan dan manajemen risiko, yang akan memberikan pengakuan kompetensi secara



formal dan meningkatkan kredibilitas petugas di lapangan. Peluang untuk mengikuti tugas belajar (S2/S3), sertifikasi internasional, seperti Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), Good Manufacturing Practices (GMP), serta sertifikasi di bidang analisis laboratorium, akan memperkuat daya saing Loka POM Tanah Bumbu dalam menjalankan tugasnya. Di samping itu, adanya kesempatan untuk mengikuti pertukaran pengetahuan dan studi banding dengan lembaga pengawasan di negara lain akan membuka wawasan pegawai mengenai praktik terbaik dalam pengawasan obat dan makanan di tingkat global.

Lebih jauh, peningkatan kapasitas SDM juga perlu diiringi dengan penguatan soft skills, seperti kemampuan komunikasi, manajemen waktu, dan kepemimpinan. Dengan demikian, pegawai Loka POM Tanah Bumbu tidak hanya mampu menjalankan tugas pengawasan dengan profesionalisme yang tinggi tetapi juga dapat membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan memanfaatkan peluang ini secara optimal, diharapkan Loka POM Tanah Bumbu dapat menjadi unit pelaksana teknis yang semakin kompeten dan berdaya saing dalam mendukung agenda nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.

Semakin meningkatnya kompetensi SDM secara langsung dapat mampu mengefisiensi layanan dan inovasi pengawasan menjadi lebih cepat dan akuntabel. Setiap tahun pegawai melakukan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan. Pelatihan yang diutamakan terkait pelatihan teknis jabatan yang diampu sehingga sinergis dengan tugas dan fungsinya.

1.3.4 Tantangan (Threat)

Ancaman dalam analisis SWOT menggambarkan faktor-faktor eksternal yang dapat menghambat atau mengganggu pencapaian tujuan strategis Loka POM Tanah Bumbu. Untuk merancang strategi yang efektif, penting bagi Loka POM untuk memahami potensi ancaman ini secara mendalam, agar dapat



mengembangkan langkah mitigasi yang sesuai. Dengan mengidentifikasi ancaman yang ada, Loka POM Tanah Bumbu dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam lima tahun mendatang.

1. **Kejahatan *Cyber* Di Bidang Obat Dan Makanan**

Dalam lima tahun terakhir, Loka POM Tanah Bumbu menghadapi tantangan signifikan terkait perkembangan perdagangan daring (e-commerce) yang semakin berkembang pesat. Masyarakat kini dapat dengan mudah membeli produk obat dan makanan hanya melalui sentuhan jari di ponsel mereka, termasuk di daerah-daerah terpencil. Namun, kemudahan ini juga disertai dengan potensi ancaman yang besar, seperti penyalahgunaan transaksi online yang melibatkan produk obat dan makanan ilegal. Loka POM Tanah Bumbu telah banyak menindaklanjuti kasus-kasus penyalahgunaan sediaan farmasi yang dijual secara daring, di mana produk-produk tersebut dikirim melalui ekspedisi ke daerah yang lebih sulit dijangkau. Ini menunjukkan tantangan dalam mengawasi produk yang beredar melalui platform e-commerce, di mana kejahatan siber dan penipuan dapat berkembang dengan cepat.

Selain itu, maraknya penjualan kosmetik tanpa izin edar, terutama yang memiliki klaim berbahaya seperti memutihkan kulit, juga menjadi masalah yang terus berkembang, khususnya di media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Produk-produk semacam ini sulit untuk diberantas, karena mereka seringkali dijual dengan cara yang tidak transparan dan menggunakan klaim yang menyesatkan. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi rendah sering kali mudah terjebak oleh informasi yang tidak akurat dan berisiko pada kesehatan mereka. Informasi yang misleading ini tersebar dengan cepat di internet, menjadikan masyarakat lebih rentan terhadap produk-produk yang tidak aman namun terlihat menarik.



Ancaman ini mengharuskan Loka POM Tanah Bumbu untuk lebih proaktif dalam mengawasi perdagangan daring dan memperkuat pengawasan terhadap produk yang beredar. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber dan perdagangan obat dan makanan ilegal perlu diperkuat, mengingat potensi bahaya terhadap kesehatan masyarakat yang semakin besar seiring dengan berkembangnya e-commerce. Dengan pendekatan yang lebih inovatif dan dinamis, Loka POM Tanah Bumbu harus beradaptasi dengan cepat untuk mengatasi ancaman ini dan memastikan bahwa masyarakat tetap terlindungi dari produk-produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Hal ini menjadi faktor lemahnya infrastruktur cyber surveillance dikarenakan belum ada sistem pemantauan digital lokal yang terintegrasi.

2. Respon Industri Dan Masyarakat Terhadap Kebijakan Nasional Obat Dan Makanan

Implementasi kebijakan nasional yang disusun oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut diterima oleh masyarakat dan industri, yang menjadi faktor utama penentu kesuksesannya di tingkat daerah, termasuk di Loka POM Tanah Bumbu. Tantangan ini menjadi lebih kompleks mengingat wilayah kerja Loka POM mencakup daerah dengan tingkat literasi rendah dan mayoritas penduduk yang termasuk kategori rural, yang memerlukan pendekatan khusus dibandingkan dengan masyarakat urban. Banyak pemilik usaha sediaan farmasi dan makanan di wilayah ini yang memiliki jenjang pendidikan yang terbatas, sehingga kesulitan untuk memahami dan menerapkan regulasi terbaru yang sering kali menggunakan bahasa yang ilmiah atau teknis. Hal ini dapat menghambat penerimaan dan kepatuhan mereka terhadap kebijakan yang ditetapkan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, industri di Tanah Bumbu dan Kotabaru juga menghadapi tantangan dalam menerima kebijakan yang ditetapkan oleh BPOM. Beberapa



kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan produksi atau pengemasan mungkin dipandang sebagai hambatan bagi perusahaan, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki kapasitas terbatas. Kebijakan yang memerlukan adaptasi signifikan dalam proses produksi atau pemasaran, atau yang mengharuskan investasi besar dalam waktu singkat, bisa memicu resistensi dari industri lokal. Jika tidak dikelola dengan baik, resistensi ini dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan sektor industri obat dan makanan di daerah, serta berisiko menciptakan ketidakseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi industri. Namun hal tersebut dapat dimitigasi dengan pendekatan co-regulation, simplifikasi kebijakan, atau model pembinaan adaptif sehingga mampu mewujudkan UMKM naik kelas dan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Oleh karena itu, Loka POM Tanah Bumbu perlu mengembangkan strategi yang dapat menyeimbangkan antara kebutuhan perlindungan kesehatan publik dan keberlanjutan industri lokal. Menciptakan kebijakan yang mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat serta industri, dengan mempertimbangkan karakteristik lokal yang lebih rural dan tingkat literasi yang bervariasi, menjadi tantangan besar. Untuk itu, pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif, dengan melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses penyusunan dan sosialisasi kebijakan, sangat diperlukan agar kebijakan dapat diterima dengan baik dan dilaksanakan secara efektif.

3. Kolaborasi Antar Lembaga Pemerintah Belum Sinergis

Dinamika politik yang terjadi pasca-pilkada dapat memengaruhi fokus program daerah yang berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan, termasuk di wilayah kerja Loka POM Tanah Bumbu. Perubahan prioritas pemerintah daerah dan kebijakan sektoral lainnya sering kali memunculkan tantangan dalam menjaga konsistensi kebijakan pengawasan yang tidak bertentangan satu sama lain. Dalam hal ini, kemampuan untuk beradaptasi



dengan perubahan yang cepat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pengawasan tetap efektif.

Koordinasi yang kurang optimal antara BPOM dan lintas sektor, seperti kementerian/lembaga atau pemerintah daerah, juga berpotensi menghambat kemampuan Loka POM dalam menciptakan sistem pengawasan yang komprehensif dan terintegrasi. Terkadang, masing-masing sektor lebih mengutamakan kepentingannya sendiri, yang bisa memperlambat proses pengambilan keputusan dan respon terhadap situasi yang membutuhkan tindakan cepat, seperti tindak lanjut hasil pengawasan Loka POM.

Kurangnya sinergi ini juga dapat memperburuk masalah peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan di masyarakat, yang pada gilirannya mengancam kesehatan publik. Sebagai solusi, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor yang lebih solid, dengan melibatkan pihak terkait untuk memastikan pengawasan obat dan makanan di Tanah Bumbu dapat berjalan dengan baik dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

4. Kondisi Geografis

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, memiliki karakteristik demografi yang unik dan tantangan tersendiri dalam pengawasan obat dan makanan. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah 5.066,96 km² dengan jumlah penduduk sekitar 341.137 jiwa pada tahun 2022, sedangkan Kabupaten Kotabaru memiliki luas wilayah 9.442,46 km² dengan jumlah penduduk sekitar 334.158 jiwa pada tahun 2022. Kepadatan penduduk di kedua kabupaten ini relatif rendah, dengan Tanah Bumbu memiliki kepadatan 68 jiwa per km² dan Kotabaru memiliki kepadatan sekitar 35,4 jiwa per km².

Wilayah-wilayah terpencil di kedua kabupaten ini memiliki akses transportasi yang terbatas, yang memerlukan sumber daya lebih besar untuk pengawasan dan distribusi produk obat dan makanan yang aman.



Keterbatasan infrastruktur transportasi ini menyebabkan distribusi produk menjadi tidak merata, sehingga meningkatkan risiko peredaran produk ilegal atau tidak memenuhi standar di daerah-daerah tersebut. Selain itu juga memerlukan waktu yang lama untuk menjangkau daerah tersebut dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh.

Selain itu, terdapat banyak pasar mingguan di wilayah-wilayah terpencil yang menjual produk sediaan farmasi dan makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pasar-pasar ini sering kali menjadi tempat peredaran produk ilegal atau tidak terdaftar, yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum di pasar-pasar tersebut memperparah situasi, sehingga meningkatkan risiko kesehatan bagi konsumen di daerah-daerah tersebut. Namun hal tersebut dapat di mitigasi dengan melakukan pengawasan secara mobile seperti mobil laboratorium keliling untuk pemastian jajanan pangan yang dijual aman dari kandungan bahan kimia berbahaya.

5. Isu Keamanan Pangan Pada Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Di Daerah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan menyediakan makanan sehat dan bergizi secara gratis bagi siswa di sekolah-sekolah. Program ini diharapkan dapat meningkatkan status gizi anak-anak dan mengurangi angka stunting di Indonesia. Dalam implementasinya, setiap Satuan Pelayanan (Satpel) MBG ditargetkan untuk memproduksi sekitar 3.000 paket makan siang setiap harinya, yang kemudian didistribusikan ke sekolah-sekolah di sekitarnya. Secara nasional, direncanakan akan dibangun lebih dari 5.000 Satpel untuk mendukung program ini. Loka POM memiliki peran penting dalam memastikan bahwa makanan yang disediakan melalui program MBG memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan, sehingga dapat mencegah risiko keracunan pangan dan memastikan manfaat gizi yang optimal bagi siswa.



Proses penyediaan bahan makanan hingga distribusi ke sekolah-sekolah dalam program MBG melibatkan berbagai tahapan yang rentan terhadap risiko keamanan pangan. Mulai dari pemilihan dan penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga pengemasan dan distribusi, setiap tahap memerlukan perhatian khusus untuk mencegah kontaminasi mikroba, bahan kimia berbahaya, atau bahan pangan yang tidak memenuhi standar. Selain itu keterbatasan kapasitas pengujian mikrobiologi dalam mendeteksi potensi penyebab KLB menjadi faktor ancaman hal ini tidak dapat ditelusur secara cepat dan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaporan KLB dari pemerintah daerah terhadap Loka POM belum terintegrasi.

Untuk mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan, Loka POM perlu melakukan pengawasan yang komprehensif terhadap seluruh proses penyediaan dan distribusi makanan dalam program MBG. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain: Audit dan Inspeksi Rutin, Pelatihan dan Edukasi, Pengujian Sampel Makanan, dan Sistem Pelaporan dan Tindak Lanjut. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan risiko KLB keracunan pangan dapat diminimalkan, sehingga program MBG dapat berjalan dengan aman dan efektif.

Keberhasilan program MBG dalam memastikan keamanan pangan memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, antara lain: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Masyarakat dan Orang Tua. Kolaborasi yang sinergis antara semua pihak ini akan memastikan bahwa program MBG dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa. Perlunya perbaikan dari prinsip Food Safety Management System dan penerapan kebijakan One Health Approach.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan status gizi anak-anak di Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Loka POM memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan



bahwa makanan yang disediakan melalui program ini aman, bergizi, dan bebas dari risiko keracunan pangan. Melalui pengawasan yang ketat, edukasi kepada semua pihak terkait, dan kolaborasi yang efektif, diharapkan program MBG dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang optimal bagi generasi penerus bangsa.

Tabel 2 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Komitmen kepemimpinan yang kuat Pemanfaatan teknologi dan inovasi Peningkatan kapasitas pengujian Edukasi dan pemberdayaan masyarakat Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini	Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Gap kompetensi pegawai Layanan perizinan Sarana dan prasarana pelayanan publik Keterbatasan anggaran
Opportunity (Peluang)	Threat (Tantangan)
Kolaborasi dengan stakeholder Peningkatan kesadaran masyarakat Peningkatan Klasifikasi UPT Pembangunan gedung pelayanan publik dan laboratorium Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Kejahatan cyber di bidang obat dan makanan Respon industri dan masyarakat terhadap kebijakan nasional obat dan makanan Kolaborasi antar lembaga pemerintah belum sinergis Kondisi geografis Isu keamanan pangan pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di daerah

1.3.5 Isu Internal

- a) SDM & Kompetensi: keterbatasan kompetensi pegawai yang berdampak signifikan pada kinerja organisasi. Mulai dari rendahnya pemahaman petugas tentang prosedur, ketidakpatuhan terhadap aturan, hingga kurangnya kemampuan dalam melaksanakan program strategis, hal ini berpotensi menurunkan profesionalisme dan kredibilitas lembaga.



- b) Manajemen Data & Dokumentasi: kelemahan dalam pengelolaan data dan dokumentasi, termasuk risiko kehilangan, ketidaklengkapan, dan kesalahan pencatatan. Permasalahan mulai dari ketidaktertiban penyimpanan arsip, risiko kebocoran informasi, hingga kesulitan penelusuran dokumen penting dapat mengganggu efektivitas kerja dan transparansi organisasi.
- c) Teknologi & Sistem Informasi: kendala teknologi dan sistem informasi, seperti koneksi internet yang tidak stabil, aplikasi yang error, dan keterbatasan akses sistem. Hal ini berpotensi menghambat kegiatan operasional, pelayanan publik, dan proses pelaporan yang cepat dan akurat.
- d) Keuangan & Anggaran: isu dalam pengelolaan keuangan dan anggaran, mulai dari ketidaksesuaian perencanaan, kesalahan penginputan, hingga penyerapan anggaran yang tidak maksimal. Permasalahan ini dapat berdampak pada penilaian kinerja organisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya.
- e) Pengawasan & Implementasi Program: kendala dalam pelaksanaan tugas pengawasan, seperti keterlambatan tindak lanjut, tidak dilakukannya pemeriksaan sesuai prosedur, dan kesulitan memenuhi target program. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas layanan dan kepercayaan publik.
- f) Keamanan & Keselamatan: isu yang berkaitan dengan keamanan aset, keselamatan pegawai, dan potensi kejadian yang membahayakan, seperti kebakaran, kehilangan barang bukti, dan risiko kecelakaan kerja. Hal ini dapat berdampak langsung pada kinerja organisasi dan kesejahteraan pegawai.



1.3.6 Isu Eksternal

- a) Pemahaman & Kesadaran Masyarakat : rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang isu kesehatan kritis, seperti stunting, keamanan obat dan makanan, serta pemahaman gender. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah serius seperti ketimpangan pengetahuan, penyebaran hoaks, dan rendahnya kepedulian terhadap kesehatan masyarakat.
- b) Pelaku Usaha & UMKM: tantangan mendasar dalam pembinaan dan pengembangan pelaku usaha lokal, di mana rendahnya pemahaman tentang dokumen mutu, persyaratan perizinan, dan praktik bisnis yang baik menghalangi potensi pengembangan produk UMKM. Akibatnya, produk lokal sulit bersaing dan tidak memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan.
- c) Pengawasan & Implementasi Program: kelemahan sistemik dalam implementasi program keamanan pangan dan pengawasan produk. Rendahnya komitmen kader dan fasilitator, tidak ditegakkannya sanksi pada produk yang tidak memenuhi syarat, dan kendala dalam proses sampling mengindikasikan gap signifikan antara rencana dan pelaksanaan program.
- d) Koordinasi & Kerja Sama: Lemahnya koordinasi antarinstansi dan minimnya kerja sama menjadi permasalahan utama dalam kategori ini. Berakhirnya kesepakatan dengan pemerintah daerah, kurangnya keterlibatan lintas sektor, dan tidak adanya pendampingan intensif pada pelaku usaha menghambat efektivitas pengawasan dan pembinaan.
- e) Infrastruktur & Teknologi: keterbatasan infrastruktur dan adopsi teknologi yang memengaruhi kinerja pengawasan. Rendahnya pemanfaatan teknologi seperti tanda tangan elektronik, keterbatasan



akses transportasi di wilayah pelosok, dan kendala ketersediaan peralatan pengujian secara signifikan menghambat kemampuan lembaga dalam melakukan pengawasan efektif.

- f) Hukum & Penegakan Hukum: kompleksitas proses penegakan hukum, mulai dari kendala dalam proses penyidikan, potensi gugatan pra-peradilan, hingga penolakan pemeriksaan oleh pelaku usaha. Kelemahan-kelemahan prosedural dan metodologis dalam penegakan hukum berpotensi melemahkan upaya pengawasan dan perlindungan konsumen.

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN KEGIATAN

2.1 VISI

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk Obat dan Makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah :

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

- 1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman :** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar



kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

- 2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu :** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
- 3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing :** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
- 4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera :** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/ *Front of Pack Nutrition labelling* (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak

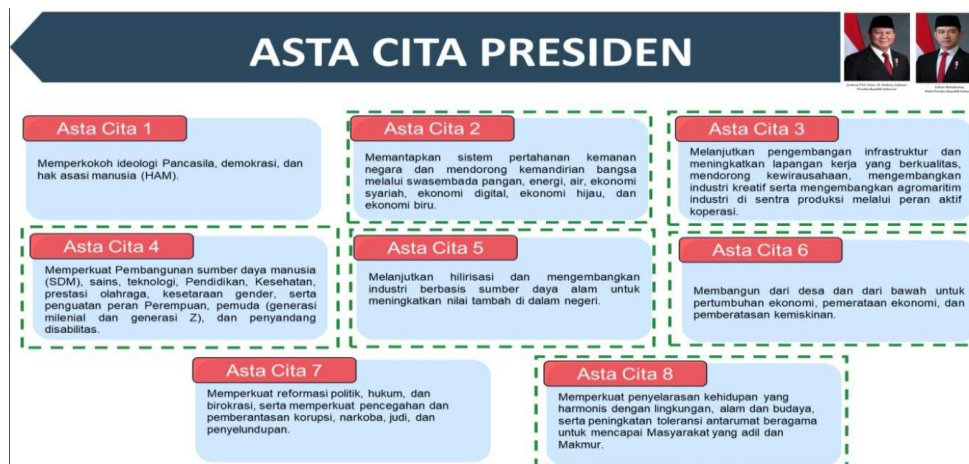


dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan. BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

2.2 MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 1 Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6, dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 1 di atas.

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah



memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.



2.3 Tujuan BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:**

Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standard keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:**

Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan



3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:**

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:**

Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:**

Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi diharapkan memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh



tujuan BPOM. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7



No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM						
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

2.4. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Tanah Bumbu. Berikut adalah sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025 - 2029 dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor obat dan makanan.



SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder



- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan



sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk



mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.



SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai AKIP UPT BPOM
- b. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- c. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
- d. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di UPT



Tabel 3 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator di Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: 1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu 2. Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025) 3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Indikator: 1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		MBG yang aman dan bermutu (2026-2029) 4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	ditindaklanjuti sesuai ketentuan 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		terhadap standar yang ditetapkan	11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Indikator: Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Indikator: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
	Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan		Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Indikator: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	Pangan Olahan		Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM Indikator: Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu Indikator: Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan



Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	Farmasi dan Pangan Olahan		
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya efektivitas KIE Indikator: 1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional,	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas,	Layanan Publik UPT yang prima Indikator: Indeks Pelayanan Publik UPT



Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima Indikator: Indeks RB BPOM	Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima Indikator: Indeks RB BPOM	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal Indikator: 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 5. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT 6. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar 7. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran strategis tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil langkah antisipatif



dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis dengan lebih efektif dan efisien.

Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran strategis BPOM sebagaimana tercantum dalam tabel 4.

Tabel 4 Indikasi Risiko Sasaran Strategis
Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Formulir penilaian kabupaten/kota aman tidak diisi	Komunikasi intensif dengan pimpinan daerah dan PIC KKPA daerah	Fungsi Infokom
		Meningkatnya peredaran sediaan farmasi yang TIE (Tanpa Izin Edar) dan hasil uji TMS (Tidak Memenuhi Syarat) di sarana yang menjadi target pemeriksaan	Melakukan pemberian sanksi Peringatan dan pemusnahan produk kepada pelaku usaha yang menjual produk Obat yang TIE dan hasil uji TMS	Fungsi Pemeriksaan
		Pengambilan sampel obat kategori tertentu (sampel hulu non JKN, anti neoplastik, dan <i>online</i>) sulit dilakukan	Melakukan koordinasi dan mengirimkan kepada KMEI terkait penggantian kategori ketika tidak ditemukan sampel dengan kriteria yang ditetapkan disertai justifikasi	Fungsi Pemeriksaan
		Sampling berulang pada sediaan farmasi dengan kategori/ klaim yang sama	Membuat rekap produk Obat (obat bahan alam, suplemen kesehatan,	Fungsi Pemeriksaan



No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
		pada 1 (satu) tahun sebelumnya	obat kuasi dan kosmetik) yang disampling terdahulu beserta hasil evaluasi penandaan/label dan hasil uji	
		Hasil uji produk pangan olahan pelaku usaha UMKM di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat)	Melakukan pendampingan intensif kepada pelaku usaha Loka (sudah mendapatkan sertifikasi CPPOB) yang sampelnya difasilitasi uji oleh Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.	Fungsi Pemeriksaan
		Sampel tidak dapat diuji dan melewati <i>timeline</i>	Monitoring secara rutin grup WA dan tautan renlak dan relisasi Regional Laboratorium region 4 Samarinda	Fungsi Pemeriksaan
		Sampel pangan fortifikasi yang ada pada lokus <i>stunting</i> tidak mencukupi minimal jumlah uji (nomor bets sama)	Memperluas lokus yang awalnya desa menjadi kabupaten sesuai pedoman sampling	Fungsi Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Tidak menindaklanjuti surat pusat terhadap penarikan produk sediaan farmasi yang ditarik dari peredaran	1. Pencatatan dan monitoring surat terkait pembersihan pasar dan penarikan produk OBA, SK dan Kosmetik yang harus ditindaklanjuti secara rutin (melalui SRIKANDI subsite atau <i>link</i> Pusat). 2. Melakukan pengawasan produk yang ditarik tersebut disetiap pengawasan rutin. 3. Mengirimkan tindak lanjut surat melalui srikandi atau aplikasi yang tersedia setiap bulan.	Fungsi Pemeriksaan
		Tidak dapat menindaklanjuti temuan komoditi tertentu di sarana (terutama temuan produk TIE)	Pembuatan Surat Tugas yang bersifat umum (mencakup semua komoditi)	Fungsi Pemeriksaan
		Ketidaksesuaian pengambilan keputusan dalam pengawasan iklan oleh petugas dengan evaluator Badan POM Pusat	1. Mengikuti bimtek pengawasan iklan 2. Koordinasi dengan evaluator Pusat bila menemukan iklan yang	Fungsi Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
			hasil evaluasinya diragukan petugas	
		Pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan melebihi <i>timeline</i> yang telah ditetapkan	1. Meminta komitmen petugas untuk segera menyelesaikan surat tindak lanjut setelah tugas 2. Menggunakan fitur reminder (pengingat) agar tidak terlewat	Fungsi Pemeriksaan
		Petugas tidak mengirimkan surat pengingat pembuatan CAPA kepada pelaku usaha ketika belum menyampaikan tindakan perbaikan melewati batas waktu yang ditetapkan	1. Sosialisasi dan penggunaan fitur reminder (pengingat) kepada petugas 2. Untuk sarana selain saryanfar dengan mengirimkan pengingat pembuatan CAPA lewat chat WA kepada pelaku usaha	Fungsi Pemeriksaan
		Perbedaan persepsi petugas dalam pembuatan dan menetapkan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan sarana distribusi	1. Penggunaan GEDAMBAAN (Google Classroom) dalam melakukan pembuatan draft surat tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi dari Ketua Tim 2. Membuat pohon keputusan pengambilan	Fungsi Pemeriksaan



No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
			kesimpulan hasil inspeksi sarana pelayanan kefarmasian	
		Tidak melakukan pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian berdasarkan pedoman (pembagian persentase target tiap jenis sarana)	Pembuatan Renlak kegiatan pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian berbasis risiko sesuai dengan pedoman dari BPOM (Pusat)	Fungsi Pemeriksaan
		Kesulitan menemukan sarana IRTTP untuk dilakukan pemeriksaan	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait permintaan data pelaku usaha IRTTP dan konfirmasi terkait alamat serta nomor yang bisa dihubungi.	Fungsi Pemeriksaan
		Penolakan oleh pelaku usaha saat akan dilakukan pemeriksaan	Menghubungi pemilik/penanggung jawab jika tidak berada di tempat dan menjelaskan tujuan pemeriksaan sesuai rencana pemeriksaan	Fungsi Pemeriksaan
		Barang hasil temuan saat pemeriksaan yang dibawa ke kantor tidak sesuai dengan peraturan	Reviu SOP dan penyamaan persepsi isi Peraturan terkait kategori barang yang	Fungsi Pemeriksaan, Fungsi Penindakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
			bisa dilakukan pengamanan ke kantor.	
		Penolakan pemberian sanksi pemusnahan pada produk OBA/SK/Kos yang tidak memenuhi ketentuan saat kegiatan Intensifikasi	Penugasan petugas lebih dari 2 orang dan/atau melibatkan tim Penindakan	Fungsi Pemeriksaan
		Pelaku usaha tidak membuat CAPA	Membuat leaflet dan flyer cara pembuatan CAPA	Fungsi Pemeriksaan
		Waktu pelaporan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang dilaporkan melalui SIPT melewati timeline	Monitoring jumlah capaian setiap bulan yang dilaporkan pada <i>link</i> monev	Fungsi Pemeriksaan
		Tidak melaksanakan publikasi terkait hasil pengawasan AMR (Antimicrobial Resistance)	Pembuatan data monitoring pengawasan AMR sesuai juknis dan melaporkan tepat waktu	Fungsi Pemeriksaan
		Petugas penguji belum memiliki kompetensi di bidang pengujian obat	1. Petugas pengujian mengikuti pelatihan 2. Petugas yang mengikuti pelatihan memberikan coaching kepada petugas lain terkait pengujian obat	Petugas Pengujian
		Terjadi bencana kebakaran	1. Membuat SOP dan sosialisasi terkait tanggap darurat bencana kebakaran	Fungsi Tata Usaha, Petugas Pengujian

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
			2. Memperhatikan sumber listrik dengan menjauhkan dari potensi konsleting (penggunaan colokan listrik yang menumpuk, kapasitas kabel dengan arus listrik tidak sesuai, sambungan kabel yang buruk, dll	
		Pengujian obat terhambat dan melebihi waktu <i>timeline</i>	Melakukan penambahan daya listrik	Kepala Loka, Fungsi Tata Usaha Petugas Pengujian
		Limbah pengujian obat merusak kondisi lingkungan	Membuat SOP terkait pengelolaan limbah pengujian	Fungsi Pemeriksaan
		Ketidakpatuhan petugas penguji dalam menggunakan APD sesuai ketentuan	Mempelajari prinsip K3 secara umum	Fungsi Pemeriksaan
		Nilai Standar Ruang Lingkup (SRL) tidak mencapai target	Pembelian reagen dan penambahan jumlah sampel yang di uji	Fungsi Pemeriksaan
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi	Tidak melakukan pemeriksaan sarana pangan fortifikasi termasuk sampling sesuai target dari Pusat	1. Membuat rencana pemeriksaan sesuai target pemeriksaan 2. Melakukan monitoring rutin terkait	Fungsi Pemeriksaan



No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
	Pangan Fortifikasi		pelaksanaan pemeriksaan	
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Hoaks terkait obat dan makanan	1. Memberikan <i>update</i> perkembangan informasi dimasyarakat dengan memanfaatkan media sosial 2. Penyebaran informasi melalui media sosial dan radio membahas isu-isu terkini	Fungsi Infokom
		Masyarakat tidak tertarik dengan konten KIE BPOM	Inovasi BPOM Tanbu Go	Fungsi Infokom
		Lintas sektor tidak mendukung program Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1. Koordinasi terkait program Tim Koordinasi Terpadu 2. Pelaksanaan kegiatan bersama SKPD terkait 3. Monev kerja sama dalam negeri	Fungsi Infokom
		Persepsi negatif dari <i>stakeholder</i> kepada Loka POM di Kab. Tanah Bumbu	Permintaan narasumber dikoordinasikan melalui mekanisme informal (wa, telpon) sebelum surat resmi disampaikan.	Fungsi Infokom
		ULPK yang tidak dapat diakses oleh masyarakat	1. Inovasi: Patin Balalah (Pusat Informasi dan Pengaduan Obat dan Makanan Keliling)	Fungsi Infokom



No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
			2. Inovasi BPOM Sailing: KIE diatas kapal feri	
		Peredaran produk TIE dan/ atau mengandung bahan berbahaya di wilayah pelosok yang belum pernah terpapar KIE dan publikasi obat dan makanan	1. Inovasi: Pais ACAN (Penyebaran Informasi ke Daerah Terpencil dan Kepulauan) 2. Pemberian <i>link</i> update e-penjelasan publik terkait beberapa komoditi (misal OBASK BKO dan TIE) kepada linsek terkait (linsek di daerah pelosok)	Fungsi Infokom
		Pengaduan terkait produk obat dan makanan tidak segera ditindaklanjuti	Inovasi: Satgas Todak (Satgas Tim Operasi Pengaduan Pelayanan Publik)	Fungsi Infokom
		Adanya pengaduan dari konsumen dan pelaku usaha terhadap kualitas pelayanan publik Loka POM di Kab. Tanah Bumbu	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat setiap tahun	Fungsi Infokom
		Informasi dan edukasi terkait obat dan makanan di media sosial tidak terupdate sesuai target jumlah dan waktu	Memanfaatkan subsite dan media sosial Loka POM secara maksimal	Fungsi Infokom

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Petugas belum memiliki kompetensi dalam melaksanakan program PJAS	1. Melakukan koordinasi dengan PIC Pusat (unit pengampu) terkait pelaksanaan program keamanan pangan jajanan sekolah 2. Bergabung di whatsapp grup SAPA SEKOLAH 2025 sebagai media update informasi pelaksanaan kegiatan program keamanan pangan jajanan sekolah tahun 2025	Fungsi Infokom
		Rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian kader keamanan pangan jajanan anak sekolah terhadap program	Menyusun jadwal advokasi dan sosialisasi program keamanan pangan jajanan anak sekolah	Fungsi Infokom
		Kurangnya kompetensi petugas terhadap pelaksanaan teknis program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)	Sharing knowledge antar petugas dan antar UPT	Fungsi Infokom
		Target desa yang diintervensi tidak sesuai dengan ketentuan	Koordinasi intensif dengan PIC GKPD di Deputi PMPU Pangan Olahan BPOM	Fungsi Infokom

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian fasilitator keamanan pangan pasar terhadap program	Pembuatan jadwal pelaksanaan kegiatan (PoA)	Fungsi Infokom
		Petugas tidak memahami terkait keamanan pangan dalam rangka mengedukasi pengelola dan pedagang untuk menjalankan Program Pasar Pangan Aman	Bergabung dalam whatsapp grup PPABK sebagai update media informasi dalam pelaksanaan program	Fungsi Infokom
		Program pengarusutamaan gender yang dikelola oleh Fungsi Infokom tidak tercapai	Menuliskan permohonan jumlah peserta laki - laki dan perempuan untuk tatap muka	Fungsi Infokom
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Pelaku usaha yang dokumennya lengkap tidak mendapatkan sertifikat izin penerapan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik)	1. Menambah petugas yang dapat melakukan penilaian sertifikasi dengan meningkatkan kompetensi, melakukan diseminasi dan diskusi rutin terkait materi sertifikasi. 2. Monitoring rutin terkait <i>timeline</i> penyelesaian sertifikasi pada aplikasi e-sertifikasi dan rekap data internal.	Fungsi Infokom, Fungsi Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Peta Rawan Kasus kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak dilakukan pemutakhiran setiap bulannya	Melakukan revisi SOP terkait batas waktu penginputan pada aplikasi Dashboard Penindakan pada tanggal 25 bulan berjalan	Fungsi Penindakan
		Dokumentasi mutasi Barang Bukti hasil penyidikan tindak pidana sediaan farmasi dan pangan olahan tidak tersedia	1. Mengarsipkan lampiran Daftar Barang Bukti yang Disita dan Berita Acara Serah Barang Bukti 2. Melaksanakan pengelolaan barang bukti berdasarkan Perka BPOM No. 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan di Seluruh Balai Besar/Balai/Loka di Seluruh Indonesia	Fungsi Penindakan
		Rencana Operasi Intelijen/ Pendalaman Informasi/ Operasi Penindakan bocor sebelum pelaksanaan	1. Melakukan serangkaian pengamanan terhadap seluruh dokumen rencana Operasi Intelijen/ Pendalaman Informasi/ Operasi	Fungsi Penindakan



No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
			Penindakan 2. Membatasi akses informasi terhadap pelaksanaan kegiatan	
		Tersangka melarikan diri sebelum dilakukan Tahap II kepada Penuntut Umum	Meminta bantuan teknis dan taktis kepada Balai Koordinator dan Pengawas (Korwas) PPNS sebelum Tahap II/ penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum	Fungsi Penindakan
		Maraknya peredaran produk OOT TIE di wilayah sekitar Perkebunan dan Pertambangan yang berada di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	Melakukan <i>brainstroming</i> penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (OOT) dengan Perangkat Desa dan Bhabinkhabtibmas setempat	Fungsi Infokom, Fungsi Penindakan
		Informasi pengiriman paket diduga berisi OOT tidak ditindaklanjuti	Kegiatan <i>Cyber Patrol</i> dan penindakan terhadap informasi peredaran OOT	Fungsi Infokom, Fungsi Penindakan
		Praperadilan dan tuntutan Perbuatan melawan hukum	Melakukan koordinasi terkait kegiatan penyidikan kepada korwas PPNS, Meningkatkan	Fungsi Penindakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
			koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi	
		Petugas yang melakukan kegiatan/ operasi intelijen dalam melakukan <i>undercover</i> diketahui oleh target operasi	1. Melakukan pergantian petugas dalam melakukan <i>undercover</i> pada target yang sama 2. Meminta bantuan petugas fungsi lain dalam melakukan <i>undercover</i> 3. Meminimalisir keterlibatan petugas yang melakukan <i>undercover</i> dalam operasi penindakan	Fungsi Penindakan
		Proses penetapan tersangka dalam tahap penyidikan kurang tepat	Selalu melibatkan / berkoordinasi dengan koordinator pengawas (korwas) PPNS Polda/Polres atau PPNS Balai Koordinator dalam melakukan gelar untuk penetapan tersangka	Fungsi Penindakan
		Berkas perkara tidak dapat diselesaikan/ terdapat pengembalian berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)/ P19	1. Melakukan perencanaan penyidikan dan gelar perkara sebelum melakukan penyidikan; 2. Melakukan	Fungsi Penindakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
			konsultasi dengan koordinator pengawas (Korwas) PPNS dan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penyidikan	
		Berkas administrasi dalam kegiatan operasi penindakan tidak lengkap	Melakukan ceklist terhadap berkas administrasi yang diperlukan dalam kegiatan operasi penindakan	Fungsi Penindakan
		Dokumen Fisik berupa Data dan Identitas PPNS Aktif Loka POM di Kab. Tanah Bumbu tidak terdokumentasi dengan baik	Melakukan penyimpanan secara terpadu pada lemari arsip Fungsi Penindakan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu	Fungsi Penindakan
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Data laporan intelijen pada aplikasi penindakan.pom.go.id tidak terkirim	1. Melakukan komunikasi dengan PIC Loka POM di Kab. Tanah Bumbu aplikasi website penindakan.pom.go.id 2. Mencadangkan Laporan kegiatan/operasi Intelijen secara luring (offline)	Fungsi Penindakan
		Laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan	Melakukan perencanaan berupa identifikasi,	Fungsi Penindakan



No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
		olahan yang dilaporkan tidak sesuai dengan pedoman dan <i>timeline</i>	evaluasi dan inventarisasi terhadap bahan penyusunan analisis kejahatan obat dan makanan	
		Potensi hilangnya data kinerja fungsi penindakan pada aplikasi ADP	Melakukan pencadangan untuk memastikan data tersimpan dengan baik selain pada aplikasi dashboard penindakan (laporan versi cetak)	Fungsi Penindakan
		PIC pelaporan tidak memperhatikan timeline pelaporan patroli siber dan profiling	Menunjuk petugas monitoring (reminder) pelaporan patroli siber dan profiling	Fungsi Penindakan
		Data akun berupa username dan password terhadap aplikasi penunjang kegiatan Fungsi Penindakan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu tidak terdokumentasi dengan baik	Menyusun daftar username dan password yang di update secara berkala untuk aplikasi penunjang Fungsi Penindakan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu	Fungsi Penindakan
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Petugas mendapat sanksi disiplin dan/atau pidana	1. Sosialisasi terkait Gratifikasi dan Benturan Kepentingan 2. Pelaporan Pengendalian Gratifikasi dan potensi Benturan	Fungsi Tata Usaha



No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
			Kepentingan secara berkala	
		Kegagalan stakeholders/ tamu bertemu dengan pimpinan	1. Konfirmasi/ menanyakan jadwal dinas Pimpinan untuk membuat SK Plh. Kepala Loka 2. Membuat janji temu dengan Pimpinan (untuk stakeholders yang merupakan mitra pengawasan)	Fungsi Tata Usaha
		Produk lokal obat dan makanan di wilayah kerja kurang mampu bersaing dengan produk dari wilayah lain	1. Membagi penanggungjawab setiap UMKM sesuai dengan kompetensi fasilitator Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu 2. Melakukan pendampingan intensif kepada pelaku usaha 3. Menyediakan template/contoh dokumen mutu untuk pelaku usaha yang mudah dipahami	Fungsi Infokom
		Pengetahuan masyarakat di wilayah kerja Loka POM Tanah Bumbu terkait	Inovasi Bekantan Bungas	Fungsi Infokom

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
		stunting dan GGL masih rendah		
		Berakhirnya kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah	Melakukan koordinasi dengan Biro Kerjasama Badan POM terkait pembaharuan Kesepakatan Bersama	Fungsi Tata Usaha
		Pengaduan dan informasi (sediaan farmasi dan pangan olahan tidak sesuai ketentuan) dari masyarakat tidak ditindaklanjuti oleh petugas	Melakukan penjabaran unsur-unsur utama kegiatan terhadap pelapor untuk membantu petugas dalam melakukan pendalaman informasi	Fungsi Penindakan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Kesalahan dalam penyusunan kertas kerja dan dokumen perencanaan kinerja	Menyusun kertas kerja penetapan kinerja dan anggaran yang mengacu pada trend data tahun sebelumnya	Fungsi Tata Usaha
		Kemungkinan blokir anggaran pembangunan gedung Laboratorium Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	Bersurat ke Kepala KPPN Kotabaru untuk permohonan pengecualian perhitungan IKPA untuk capaian output pada KRO Pagu Automatic Adjustment.	Fungsi Tata Usaha



No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Ketidaksesuaian pencatatan paket pengadaan pada aplikasi SIRUP (LPSE)	Melakukan pemeriksaan bertingkat antara operator dan KPA	Fungsi Tata Usaha
		Adanya penyalahgunaan data dari sistem aplikasi yang digunakan oleh Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	Pembuatan Surat Keputusan hak akses pengguna aplikasi SAKTI	Fungsi Tata Usaha
		Kompetesi yang dimiliki pegawai baru (PPPK) dalam melaksanakan tugas belum memadai	1. Melakukan Pembelajaran Mandiri Online (aplikasi IDEAS) utk semua materi terkait tupoksinya 2. Mengikuti pelatihan dari Pusat secara Luring/ Daring sesuai tupoksinya	Fungsi Tata Usaha
		Diseminasi tidak dilakukan secara rutin oleh pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek/workshop teknis sesuai jabatan	Adanya SOP Pengembangan Kompetensi	Fungsi Tata Usaha
		Pelaksanaan jasa tidak memberikan output sesuai dengan spesifikasi yang disepakati	Membuat dan Mengisi form evaluasi pelayanan jasa	Fungsi Tata Usaha
		Kesalahan pencatatan persediaan pada aplikasi persediaan	Melakukan pengecekan ulang penginputan aset persediaan sebelum	Fungsi Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
			dilakukan finalisasi oleh KPA	
		Ketidaksesuaian pembayaran pajak pada penyedia	Pengecekan Ketersediaan Dokumen Pengadaan (Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima, Berita Acara Pembayaran, dan Kuitansi)	Fungsi Tata Usaha
		Ketidakpatuhan pegawai dalam penggunaan Sistem informasi Badan POM	Monitoring penggunaan <i>e-mail corporate</i> dan BCC (<i>BPOM Command Center</i>) secara berkala	Fungsi Tata Usaha
		Koneksi internet lambat/ tidak stabil	Sosialisasi terkait penggunaan konektivitas internet yang baik dan penyamaan persepsi terkait kecepatan koneksi internet	Fungsi Tata Usaha
		Terjadi kejadian yang tidak diinginkan saat pengawasan (intimidasi, ancaman, atau gangguan)	Meminta bantuan personil saat melakukan pengawasan terutama di tempat rawan (pemda atau kepolisian)	Fungsi Tata Usaha
		Penurunan nilai <i>talent pool</i> pada sejumlah pegawai untuk persiapan menduduki jabatan lebih	1. Memaksimalkan capaian kinerja (SKP) pegawai dengan hasil diatas ekspektasi	Fungsi Tata Usaha



No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
		tinggi/jabatan strategis lainnya	2. Melakukan pemutakhiran data kompetensi, potensi, dan rekam jejak pegawai (pendidikan, penghargaan dll)	
		Penyerapan anggaran tidak maksimal (tidak mencapai target)	1. Penugasan pegawai dalam pengelolaan anggaran (Bendahara, PPK, PPSPM, staf pengelola keuangan) 2. Monitoring serapan anggaran melalui aplikasi SAKTI 3. Penggunaan aplikasi PIAN (Pertanggungjawaban Kuitansi dan Keuangan) dalam menunjang kegiatan penyelesaian pertanggungjawaban	Fungsi Tata Usaha
		Keterlambatan penyetoran pajak penghasilan atas belanja jasa	Mengingatkan dan menggunakan sistem jemput bola terhadap penanggungjawab kegiatan yang kuitansinya wajib dilakukan penyetoran pajak agar dapat	Fungsi Tata Usaha



No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
			dibayarkan paling lambat 7 hari kalender dari tanggal pelaksanaan kegiatan.	
		Kesalahan dalam penginputan pertanggungjawaban keuangan (dobel, salah MAK)	Dobel cek antara operator dan PPK	Fungsi Tata Usaha
		Minimnya pengetahuan pengelola keuangan terhadap pengajuan besaran UP pada awal Tahun Anggaran	1. Memaksimalkan penggunaan dan pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) 2. Monitoring Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) melalui aplikasi SAKTI 3. Pelatihan Teknis Pengelolaan UP	Fungsi Tata Usaha
		Minimnya pengetahuan pengelola keuangan terhadap pengukuran Rencana Penarikan Dana (RPD) yang tercantum dalam Halaman III DIPA dengan	1. Melaksanakan Kegiatan sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD) 2. Monitoring Deviasi Halaman III DIPA melalui aplikasi SAKTI	Fungsi Tata Usaha



No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
		realisasi penyerapan anggaran		
		Ketidaksesuaian perencanaan belanja PDN yang diumumkan pada RUP dan Realisasi Pemilihan Belanja PDN	1. Penyusunan RUP dengan teliti dan pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa dengan maksimal 2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat dan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) jika mengalami masalah dalam Pengadaan Barang/ Jasa	Fungsi Tata Usaha
		Terjadi kesalahan input data realisasi kinerja	Pembuatan link Monev dan renlak yang dapat dimonitoring secara langsung	Fungsi Tata Usaha
		Laporan BMN tidak sesuai dengan ketentuan dan <i>timeline</i> (Keterlambatan penyampaian laporan BMN)	1. Inventarisasi BMN secara rutin 2. Ketepatan penyampaian laporan BMN sesuai <i>deadline</i> yang diberikan	Fungsi Tata Usaha
		Kerusakan BMN akibat telah melebihi masa manfaat	1. Melakukan pengecekan pelaporan barang yang rusak dan tindak lanjut perbaikan	Fungsi Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
			2. Pemantauan dan perawatan BMN secara berkala	
		Kelalaian petugas dalam penyimpanan, penggunaan, atau pengawasan BMN.	Pengecekan berkala (tiap semester) kepada penanggung jawab DBR	Fungsi Tata Usaha
		Adanya selisih stok persediaan (Penatausahaan persediaan yang belum tertib)	1. Melakukan <i>stock opname</i> setiap 3 bulan 2. Penggunaan aplikasi PAPADAAN dan pembatasan akses petugas dalam pengambilan persediaan	Fungsi Tata Usaha
		Terjadinya kelemahan penerapan manajemen risiko secara berulang pada unit kerja tahun 2025	- Sosialisasi penerapan manajemen risiko di lingkungan unit kerja - Penyusunan daftar risiko unit kerja - Pelaporan manajemen risiko semester I dan II tepat waktu - Pelatihan manajemen risiko pada aplikasi IDEAS	Tim Manajemen Risiko
		Keterlambatan atau tidak terlaksananya rencana aksi reformasi birokrasi sesuai jadwal yang ditetapkan	Monitoring rencana aksi per triwulan	Tim Reformasi Birokrasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
		dalam rencana aksi triwulanan		
		<i>Back up</i> data aplikasi TATAMBA SIADING sulit dilakukan	1. Pembuatan juklak/ juknis pemindahan data/ back up data aplikasi TATAMBA SIADING 2. Penunjukan PIC/ penanggungjawab untuk melakukan back up data	Fungsi Tata Usaha
		Tidak melakukan pembayaran penggunaan <i>Houstring</i> aplikasi TATAMBA SIADING	Melakukan pembayaran tepat waktu dengan mencatat batas terakhir pembayaran	Fungsi Tata Usaha
		Format naskah dinas tidak sesuai ketentuan	1. Evaluasi penciptaan Naskah Dinas (screening/ survei) 2. Pembinaan Tata Naskah Dinas	Fungsi Tata Usaha
		Ketidaklengkapan isi berkas arsip yang dapat menyebabkan kehilangan sebagian/ seluruh isi berkas arsip	1. Pembinaan terkait pemberkasan; 2. Pembuatan <i>tools</i> monitoring (Agenda UP) yang diupdate oleh seluruh petugas; 3. Monev pemberkasan melalui SIARAN (bulanan).	Fungsi Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Kehilangan sebagian/ seluruh isi berkas arsip	1. Penunjukan PIC/ penanggungjawab yang memonitoring kelengkapan arsip di Unit Pengolahnya yaitu SK terkait PIC/ Penanggungjawab Monitoring Kelengkapan Arsip 2. Sosialisasi alur peminjaman arsip sesuai dengan Alur Peminjaman Arsip yang dapat dilihat pada Pedoman Kebijakan Pengelolaan Kearsipan (halaman 68 dan 155)	Fungsi Tata Usaha
		Kerusakan dan/ atau kehilangan sebagian/ seluruh isi berkas arsip (arsip aktif dan arsip inaktif)	1. Sosialisasi jenis arsip (termasuk arsip vital) 2. Pemeliharaan arsip sesuai jenis arsip dan Pelaporan daftar arsip 3. Analisis kebutuhan dan pemenuhan sarpras penyimpanan arsip	Fungsi Tata Usaha
		Ketidaksesuaian pembuatan daftar arsip tematik berdasarkan tema, kategori dan isi daftar arsip tematik	Koordinasi dengan Biro Umum terkait contoh pembuatan daftar arsip tematik yang sesuai	Fungsi Tata Usaha



No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Kesalahan penentuan kategori arsip dalam suatu rangkaian kegiatan penciptaan arsip sampai pemberkasan arsip	Melakukan pemutakhiran Database sesuai dengan JRA terbaru	Fungsi Tata Usaha
		Pengelola Arsip masing-masing Unit Pengolah tidak mengetahui pengelolaan arsip tematik sesuai dengan ketentuan	1. Konsultasi kepada Biro Umum BPOM terkait daftar arsip tematik 2. Pembuatan daftar arsip tematik	Fungsi Tata Usaha
		Arsip diakses oleh pihak yang tidak berwenang	1. Pembinaan dan evaluasi; 2. Pembuatan analisis kebutuhan sarpras; 3. <i>Overtime</i> penyusunan untuk penyimpanan arsip sesuai ketentuan.	Fungsi Tata Usaha
		Pemusnahan Arsip Inaktif tidak dapat dilakukan	Melakukan koordinasi dengan Biro Umum untuk menanyakan progres penilaian oleh ANRI secara berkala	Fungsi Tata Usaha
		Petugas tidak mengetahui cara penggunaan tanda tangan elektronik	Sosialisasi cara menggunakan tanda tangan elektronik	Fungsi Tata Usaha

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin. Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus



dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.

3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.



5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.



2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Berdasarkan arah kebijakan BPOM diatas, maka Loka POM di Kab. Tanah Bumbu akan mendukung dan melaksanakan arah kebijakan tersebut, diantaranya:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta proaktif dan mengedepankan Kerjasama lintas sektor dengan berbagai Aparat Penegak Hukum (APH).



3. Peningkatan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha termasuk pengembangan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan Kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Berdasarkan pada arah kebijakan yang telah disusun untuk tahun 2025-2029 dan melihat pada Analisa SWOT yang telah dilakukan, Loka POM di Kab. Tanah Bumbu telah memiliki beberapa strategi yang akan dilakukan, diantaranya:

1. Perkuatan pengawasan pre dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan dan makan bergizi gratis secara komprehensif dan berbasis resiko. Kemudian dengan memperluas cakupan pengawasan produk pada sarana yang tidak berizin. Pengawasan akan terus dikembangkan agar mampu merespons dinamika pasar, regulasi, dan teknologi. Kompetensi petugas pengawas dituntut untuk memiliki kompetensi teknis yang tinggi serta kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan.
2. Memperkuat kerja sama lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan hilirisasi produk obat dan makanan. Hal ini mendorong sinergi antara sektor pemerintah, swasta/CSR dan masyarakat dalam memperkuat rantai nilai produk obat dan makanan. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing produk lokal yang aman dan bermutu.



3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik yang efektif dengan dukungan teknologi informasi yang optimal. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, masyarakat dan/atau komunitas, menjadi kunci dalam memperluas jangkauan pengawasan. Dukungan teknologi informasi akan dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi secara efektif dan membangun kesadaran publik terhadap keamanan obat dan makanan.
4. Koordinasi dan bersinergi bersama aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan untuk perkuatan penindakan dengan mengedepankan pencegahan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan. Selain itu Upaya penegakan hukum dilakukan dengan memperluas cakupan pengawasan pada sarana daring/online yang melakukan dugaan tindak pidana sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Peningkatan klasifikasi UPT serta Pembangunan Gedung pelayanan publik dengan sarana serta prasarana laboratorium yang didukung oleh kompetensi teknis pengawasan obat dan makanan yang kompeten serta adaptif terhadap dinamika regulasi dan inovasi teknologi sesuai dengan standar. Hal ini untuk memastikan tersedianya fasilitas laboratorium dan pelayanan publik yang modern, aman, dan sesuai standar. Peningkatan ini akan didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi teknis dalam pengawasan obat dan makanan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi dan perkembangan teknologi terkini.
6. Memperkuat pengawasan obat dan makanan lintas sektor dalam mendukung Reformasi birokrasi dan pengawasan internal secara kuat dan terukur untuk mengoptimalkan struktur organisasi dan kelembagaan. Pengawasan yang terintegrasi antar sektor dan penguatan pengawasan internal akan dilakukan secara sistematis dan terukur. Tujuannya adalah untuk memperkuat struktur organisasi dan kelembagaan agar lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan pengawasan.



- Memperkuat Reformasi Birokrasi dalam pengawasan obat dan makanan dengan mengoptimalkan kompetensi teknis yang kompeten dan adaptif terhadap dinamika regulasi dan inovasi teknologi serta dikelola secara profesional berbasis merit. Sebagaimana yang diamanatkan pada Reformasi Birokrasi yang memfokuskan pada peningkatan profesionalisme dan integritas aparatur melalui pengelolaan berbasis merit

Dalam rangka mendukung arah kebijakan BPOM Tahun 2025-2029, strategi yang dihasilkan melalui Analisis SWOT di atas akan dikaitkan lebih lanjut dengan arah kebijakan BPOM dengan tabel berikut:

***Matriks Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM
di Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2029***

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis.	Pengembangan pengawasan dilakukan agar mampu merespons dinamika pasar, regulasi, dan teknologi. Termasuk pengawasan terhadap sarana yang tidak berizin dan program makan bergizi gratis.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Koordinasi dan bersinergi bersama aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan untuk perkuatan penindakan dan memperluas cakupan pengawasan pada sarana daring/online yang melakukan dugaan tindak pidana sediaan farmasi dan pangan olahan.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	sinergi antara sektor pemerintah, swasta/CSR dan masyarakat dalam memperkuat rantai nilai produk obat dan makanan. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing produk lokal yang aman dan bermutu
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, masyarakat dan/atau komunitas, menjadi kunci dalam memperluas jangkauan pengawasan. Dukungan teknologi informasi akan dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi secara efektif dan membangun kesadaran publik terhadap keamanan obat dan makanan
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Proaktif terhadap para pemangku kepentingan yang terdapat program pada bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan klasifikasi UPT serta Pembangunan Gedung pelayanan publik dengan sarana serta prasarana laboratorium yang didukung oleh kompetensi teknis pengawasan obat dan makanan yang kompeten serta adaptif terhadap dinamika regulasi dan



ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	inovasi teknologi sesuai dengan standar.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Memperkuat Reformasi Birokrasi dalam pengawasan obat dan makanan dengan mengoptimalkan kompetensi teknis yang kompeten dan adaptif terhadap dinamika regulasi dan inovasi teknologi serta dikelola secara profesional berbasis merit

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implemenasi arah kebijakan dan strategi Loka POM di Kab. Tanah Bumbu juga akan dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial

3.3 Program dan Kegiatan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Loka POM di Kab. Tanah Bumbu dalam melaksanakan kegiatan "Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia". Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kab. Tanah Bumbu mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Loka POM di Kab. Tanah Bumbu tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM. Loka POM di Kab. Tanah Bumbu juga menetapkan



beberapa kegiatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diantaranya:

1. Sertifikasi sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan
 - a. Sertifikasi Sarana Produksi Pangan
 - b. Sertifikasi Sarana Produksi Obat Tradisional
 - c. Sertifikasi Sarana Produksi Kosmetik
 - d. Sertifikasi Sarana Distribusi Obat
2. Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian
3. Pengawasan Sarana Produksi Obat Tradisional dan Kosmetik
 - a. Sarana Produksi Obat Tradisional
 - b. Sarana Produksi Kosmetik
4. Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
5. Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan
6. Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dan KLB KP
7. Pengawasan Post Market Iklan dan Penandaan Obat dan Makanan
8. Pelaksanaan Desk Registrasi bersama dengan Direktorat Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Direktorat Registrasi Kosmetik
9. Kabupaten/Kota Pangan Aman
10. Fasilitasi dan Pembinaan UMKM
 - a. Program Pendampingan UMKM Obat Tradisional
 - b. Program Pendampingan UMKM Kosmetik
 - c. Program Pendampingan UMKM Pangan Olahan
11. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
 - a. Penyebaran Informasi Obat dan Makanan
 - b. Inovasi BPOM Tanah Bumbu Goes to Community
 - c. Inovasi BPOM Sailing
 - d. Inovasi Bakantan Bungas
12. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga



- a. Desa Pangan Aman
 - b. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
 - c. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman
13. Komunikasi Publik
 - a. Publikasi melalui Media Sosial
 - b. Publikasi melalui Media Online
 - c. Publikasi melalui Media Cetak
 - d. Publikasi melalui Media Luar Ruang
 - e. Publikasi melalui Media Elektronik
 - f. Publikasi melalui Media Digital
 - g. Inovasi Pais Acan
 - h. Inovasi Satgas TODAK
14. Pelayanan Publik
 - a. Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)
 - b. Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bertahap
 - c. Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) Bertahap Golongan A
 - d. Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) Bertahap Golongan B
 - e. Sertifikasi Penerbitan Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika
 - f. Sertifikasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
 - g. Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat.
15. Sosialisasi dan Desk Registrasi Pangan Olahan
16. Audit Surveilans Penerapan SMKPO (Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan)
17. Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

- a. Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan
 - b. Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan
 - c. Penggalangan stakeholder dalam rangka pencegahan kejahatan obat dan makanan
18. Intelijen Obat dan Makanan
 - a. Operasi Intelijen Tematik Bersama Lintas Sektor
 - b. Peningkatan Kompetensi Petugas Intelijen BPOM
19. Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber
 - a. Perkuatan Kemitraan dan Kerja Sama di Bidang Siber Peredaran Obat dan Makanan
 - b. Peningkatan Kompetensi Petugas di Bidang Siber Obat dan Makanan
 - c. Penguatan Engine Data Crawler
20. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan
 - a. Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal
 - b. Perkuatan Koordinasi dengan Criminal Justice System
 - c. Peningkatan Kinerja Penyidikan Obat dan Makanan
21. Pengujian Obat dan Makanan
 - a. Pengujian cepat / *rapid test*

Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana merupakan penunjang utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan di Loka POM di Kab. Tanah Bumbu. Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Loka POM di Kab. Tanah Bumbu. Upaya perkuatan tata Kelola melalui penerapan sistem manajemen asset yang terintegrasi, pengawasan internal yang rutin serta peningkatakan kemampuan pegawai dalam mengelola administrasi keuangan dan asset negara.



BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Sasaran akhir pembangunan BPOM dalam memperkuat pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu memastikan produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 4 Matriks Kerangka Kinerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.75	89	90.25	91.5	92.75
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan	0	27	28	29	30



No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	Olahan di wilayah kerja UPT		yang telah melaporkan KTD/ESO					
		3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	77	79	81	83
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	77	79	82	85
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	87	88	89	90	91
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan	90	92	94	96	98



No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
			ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.75	94.88	96	97.13	98.25
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.4	90	91.6	93.2	94.4
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	81	82	83	84
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	12	13	16	20

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50	100	100	100	100
		16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81	82	83	84
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67	67	100	100	100
3	Meningkatnya efektivitas KIE	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.38	87.25	88.11	88.97	89.84
		2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	3	4	5	6
		3	Jumlah desa pangan aman	1	1	1	1	1



No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	13.33%	30.00%	50.00%	73.33%	100.00%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90	91	92	93	94
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94



No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT							
7	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.4	4.45	4.5	4.55	4.6
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai AKIP UPT BPOM	77.24	78.24	79.24	80.24	81.24
		2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.88	2.97	2.99	3	3.05
		4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	100	100

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Tabel 5 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan

Program	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengawasan Obat dan	1.818.110,0	17.363.543,0	20.072.605,9	8.994.387,6	10.192.703,9



Program	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Makanan di seluruh Indonesia					
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.472.559,0	3.214.326,0	4.178.624,7	5.432.212,1	7.061.875,6
TOTAL	4.290.669,0	20.577.869,0	24.251.230,6	14.426.599,7	17,254,579,5

Kerangka pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan tantangan pengawasan dalam kurun waktu 2025-2029 serta dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang ingin dicapai.

Pada akhir 2025-2029, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan mampu:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan bersama lintas sektor dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE guna mewujudkan masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu melalui program
3. Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industry Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan anan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM melalui berbagai kegiatan pembinaan/regulatory assistance yang diberikan kepada pelaku usaha
4. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penyelenggaraan fungsi deteksi kejahatan dan penyidikan yang optimal.



Tabel 6 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	4.290.669,0	20.577.869,0	24.251.230,6	14,426,599,7	17,254,579,5
Total	4.290.669,0	20.577.869,0	24.251.230,6	14,426,599,7	17,254,579,5



BAB 5

PENUTUP

Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025-2029 disusun sebagai panduan dalam mencapai kinerja optimal dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu serta sebagai acuan dalam perencanaan kinerja dengan dinamika lingkungan strategis dalam periode baru pembangunan Nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dokumen ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Renstra BPOM 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di Lingkungan BPOM baik untuk perencanaan menengah dan tahunan.

Acuan dalam perencanaan kinerja dibuat untuk mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk Memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM, mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Diharapkan semua bagian Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dapat melaksanakan semua sasaran kegiatan dan target kinerja dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu. Guna mendukung visi Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 dengan menjamin keamanan dan mutu produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat untuk pelaku industri



LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025-2029												
Kegiatan	No	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Target				Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT												Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	90.25	91.5	92.75						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27	28	29	30						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77	79	81	83						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025-2029												
Kegiatan	No	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Target				Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77	79	82	85						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	89	90	91						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	94	96	98						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025-2029												
Kegiatan	No	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Target				Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.88	96	97.13	98.25						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	89	92	95						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90	91.6	93.2	94.4						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	81	82	83	84						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025-2029												
Kegiatan	No	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Target				Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12	13	16	20						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	100	100	100	100						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81	82	83	84						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
		RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	0	0	0							Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
		RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	0	0	0							Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025-2029												
Kegiatan	No	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Target				Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	0	0	0							Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
		RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	0	0	0							Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
		RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	0	0	0							Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
		RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM	0	0	0							Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
		RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	0	0	0							Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025-2029												
Kegiatan	No	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Target				Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	0	0							Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
		RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	0	0							Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
		RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar	0	0	0							Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
		Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi										Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67	100	100	100						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025-2029												
Kegiatan	No	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Target				Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	0	0	0							Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
		Meningkatnya efektivitas KIE										Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.25	88.11	88.97	89.84						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	3	4	5	6						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	3	Jumlah desa pangan aman	1	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025-2029												
Kegiatan	No	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Target				Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	0	0	0							Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
		RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	0	0	0							Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
		RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0							Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
		RO 4: Desa Pangan Aman	0	0	0							Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
		RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	0	0	0							Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
		Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu										Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025-2029												
Kegiatan	No	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Target				Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	30.00 %	50.00 %	73.33 %	100 %						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
		RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	0	0	0							Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
		Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	0	0	0							Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91	92	93	94						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
		RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	0	0	0							Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025-2029												
Kegiatan	No	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Target				Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT										Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91	92	93	94						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
		RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	0	0	0							
		Layanan Publik UPT yang prima										Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.45	4.5	4.55	4.6						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025-2029												
Kegiatan	No	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Target				Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		RO 1: Keputusan/ Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	0	0	0							Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
		Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal										Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	1	Nilai AKIP UPT BPOM	78.24	79.24	80.24	81.24						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.97	2.99	3	3.05						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	100						Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025-2029												
Kegiatan	No	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Target				Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0							Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
		RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0	0	0							Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
		RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi	0	0	0							Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM					0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
		RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	0	0	0							Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
		RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola	0	0	0							Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025-2029												
Kegiatan	No	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Target				Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		pemerintah Unit Organisasi yang optimal"										